

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PUTRA PUTRI AL- MIFTAH LIL ULUM KABUPATEN ROKAN HULU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh :

DESI RISTIANI

175310523

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : DESI RISTIANI
NPM : 175310523
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PUTRA PUTRI AL-MIFTAH LIL ULUM KABUPATEN ROKAN HULU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 26 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Juni 2021
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat didalamnya karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang yang dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekanbaru, 31 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,

Desi Ristiani

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PUTRA PUTRI AL-MIFTAH LIL ULUM KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh :
DESI RISTIANI
175310523

Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum yang beralamat di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pondok pesantren dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan di pondok pesantren meliputi (1) Buku Kas Harian, (2) Laporan Keuangan Bulanan, (3) Laporan Posisi Keuangan, (4) Laporan Aktivitas, serta menyajikan (5) Daftar Aset Tetap. Penerapan tentang akuntansi yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum secara umum belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45, Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ACCOUNTING AT THE SALAFIYAH PUTRA PUTRI AL-MIFTAH LIL ULUM ISLAMIC BOARDING SCHOOL FOUNDATION, ROKAN HULU REGENCY

By:

DESI RISTIANI

175310523

This research was conducted at the Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum Islamic Boarding School Foundation, which is located in Marga Mulya Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency, Riau. The purpose of this Research was to determine the suitability of the accounting implementations carried out by Islamic boarding schools with General Accepted Accounting Principles. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The data collection techniques used were observation, interview and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques applied in this study include data reduction, data presentation and conclusion drawing.

Based on the results of research showed, it can be concluded that the accounting process applied in Islamic boarding schools includes (1) Daily Cash Book, (2) Monthly Financial Reports, (3) Financial Position Reports, (4) Activity Reports, and presents (5) Asset List. Permanent. In general, the application of accounting carried out by the Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum Islamic Boarding School Foundation is not in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles.

Keywords: *Accounting Implementation, Statement of Financial Accounting Standards no. 45, Acceptable Accounting Principles.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim....

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Nikmat serta kesempatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Analisis Penerapan Akuntansi Pada Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum Kabupaten Rokan Hulu**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis ucapkan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, arahan serta motivasi dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar serta menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE.,M.Si, AK, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si, Ak, CA selaku ketua Jurusan Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, SE., M.Si, Ak, CA selaku dosen Pembimbing Akademis yang telah membantu penulis dalam memudahkan urusan perkuliahan.
5. Bapak dan ibu dosen program studi akuntansi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan ibu Staf, serta karyawan dan pegawai tata usaha yang telah membantu dalam lancarnya penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Hasan dan Ibu Siti , terimakasih banyak atas semua dukungan, semangat serta cintanya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi dengan baik.
9. Adikku tersayang Angga Ria Saputra dan putri kecil kakak Assyifa Khoirunnisa, terimakasih untuk kalian berdua, kalian sumber semangat kakak untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
10. Untuk pakde Hartoyo, Hardi dan Bude Nunung, Mulyani terimakasih juga *support* nya selama ini tanpa *support* dari kalian mungkin penulis tidak akan seperti sekarang ini.
11. Bapak Harahap dan Ibu Nurlia Syavitri S.I.P penulis juga mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan, semangatnya. Terimakasih telah menjadi orang tua keduaku di kota ini, terimakasih untuk semua kebaikan

yang telah ibu bapak beri kepada penulis, mungkin hanya kata terimakasih yang mampu penulis ucapkan untuk sekarang ini.

12. Buat sahabat aku Anggun Permata Putri, Kiki Oktaviani terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, support dan semangat yang membangun serta argumen-argumen yang telah diberikan saat perkuliahan.
13. Teman - teman se kos terkhusus Novia'Aan Desri, terimakasih semua kebaikan yang tidak bisa penulis ucapkan dengan kata-kata, terimakasih sudah menjadi teman bisnis serta teman disaat susah senangnya penulis.
14. Untuk teman kelas A terkhusus Jumita Frensisika, Febriana Eka Safitri, Syabrina Syakira, Shakinah Azzuria, Taufik Indra Rangkuti, Dwiki Kushrama Hervades, Iqbal Alansyah, dan Giovani Wijaksan, serta angkatan 2017 lainnya yang tidak bisa penulis ungkapkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, materi maupun teknik penulisan. Untuk itu penulis berharap kritik dan sarannya kepada pembaca yang bersifat membangun.

Terakhir, penulis kembali mengucapkan terimakasih untuk semua pihak yang sudah terlibat dalam proses menyelesaikan skripsi ini, semoga semua kebaikan dberi balasan yang setimpal oleh Allah SWT, Amiin Allahuma Amiin.

Pekanbaru, Desember 2020

Desi Ristiani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9

BAB II. TELAHAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1 Telaah Pustaka	11
2.1.1 Definisi Akuntansi	11
2.1.2 Konsep Yayasan	13
2.1.2.1 Pengertian Yayasan	13
2.1.2.2 Tujuan Yayasan	14
2.1.2.3 Dasar Hukum Yayasan	15
2.1.2.4 Sumber Kekayaan/Pembiayaan	18
2.1.2.5 Struktur Organisasi Yayasan	19
2.1.3 Pondok Pesantren	20
2.1.4 Dasar Pencatatan Akuntansi	21
2.1.5 Siklus Akuntansi	23
2.1.6 Konsep Akuntansi Aset Tetap.....	26
2.1.6.1 Pengertian Aset Tetap	26
2.1.6.2 Klasifikasi Aset Tetap.....	27
2.1.6.3 Pengakuan Aset Tetap.....	27
2.1.6.4 Pengukuran Aset Tetap.....	28
2.1.6.5 Penyusutan Aset Tetap.....	30
2.1.6.6 Pengeluaran Aset Tetap	34
2.1.6.7 Pelepasan Aset Tetap	35
2.1.6.8 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap	35
2.1.7 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba PSAK No.45	36
2.1.8 ISAK No.35 tentang Laporan Keuangan Entitas Nonlaba	44
2.1.9 Penelitian Terdahulu	47
2.2 Hipotesis	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Desain Penelitian	49
3.2 Objek Penelitian	49
3.3 Jenis dan Sumber Data	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data	50

3.5 Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.1.1 Sejarah Singkat Yayasan.....	54
4.1.2 Struktur Organisasi Yayasan.....	55
4.1.3 Visi dan Misi Yayasan	55
4.1.4 Aktivitas Yayasan	59
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	59
4.2.1 Dasar Pencatatan.....	60
4.2.2 Proses Akuntansi.....	60
4.2.3 Analisis Penerapan Akuntansi pada Yayasan	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1 Simpulan	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Format Laporan Posisi Keuangan Entitas Nirlaba.....	39
Tabel 2.2	: Format Laporan Aktivitas Entitas Nirlaba.....	41
Tabel 2.3	: Format Laporan Arus Kas Entitas Nirlaba.....	42
Tabel 2.4	: Penelitian Terdahulu	47
Tabel 4.1	: Buku Kas Harian.....	62
Tabel 4.2	: Jurnal Penerimaan Kas.....	63
Tabel 4.3	: Jurnal Pengeluaran Kas.....	64
Tabel 4.4	: Buku Besar.....	65
Tabel 4.5	: Neraca Saldo	67
Tabel 4.6	: Laporan Aktivitas Yayasan.....	71
Tabel 4.7	: Laporan Aktivitas.....	73
Tabel 4.8	: Laporan Posisi Keuangan Yayasan.....	74
Tabel 4.9	: Laporan Posisi Keuangan	77
Tabel 4.10	: Laporan Arus Kas	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Yayasan 56



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Posisi Keuangan 2018-2019
- Lampiran 2 : Laporan Aktivitas 2018-2019
- Lampiran 3 : Laporan Keuangan Bulanan 2018-2019
- Lampiran 4 : Daftar Aset Tetap 2018-2019
- Lampiran 5 : Buku Kas Harian 2018-2019
- Lampiran 6 : Bukti Transaksi
- Lampiran 7 : Akta Pendirian
- Lampiran 8 : Struktur Organisasi
- Lampiran 9 : Dokumentasi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktik akuntansi di Indonesia berkembang sangat pesat, khususnya dalam dunia bisnis. Tidak hanya itu, akuntansi juga digunakan di berbagai bidang kehidupan. Akuntansi adalah salah satu sistem yang mengukur aktivitas bisnis, kemudian memproses informasi kedalam bentuk laporan keuangan dan mengkomunikasikannya kepada pengambil keputusan. Akuntansi biasanya digunakan dalam dunia bisnis untuk organisasi yang berorientasi laba, namun tidak hanya itu organisasi nonprofit juga memerlukan akuntansi untuk mengukur setiap perkembangan aktivitas organisasinya.

Menurut PSAK No.45 organisasi nonprofit atau organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa adanya perhatian terhadap hal-hal yang mencari laba. Karakteristik organisasi nonlaba berbeda dengan organisasi bisnis, perbedaan tersebut terletak pada cara organisasi untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas organisasinya. Sumber daya organisasi nirlaba diperoleh dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain tanpa mengharap imbalan. Oleh karena itu, organisasi non laba tentunya akan memunculkan transaksi yang berbeda dengan organisasi laba pada umumnya.

Tidak hanya organisasi laba, organisasi nirlaba seperti yayasan juga memerlukan jasa akuntansi. Namun, sifat yayasan yang cenderung berbeda dengan organisasi laba, membuat sifat akuntansinya juga berbeda. Yayasan menggunakan jasa akuntansi untuk pertanggungjawaban atas sumber dana yang diperoleh dari donatur, anggota dan penyumbang lain, serta untuk menghasilkan informasi-informasi keuangan dan meningkatkan mutu pengawasan yayasan tersebut. Sedangkan organisasi laba menggunakan akuntansi untuk mendapatkan informasi keuangan yang relevan dan berguna dalam menilai perkembangan organisasi.

Karakteristik yayasan yang berbeda dari organisasi laba, bukan berarti sifat akuntansi keduanya berbeda. Persamaan akuntansi dari yayasan dan akuntansi organisasi laba salah satu contohnya perusahaan adalah meliputi keseluruhan proses akuntansi mulai dari pengakuan transaksi, kemudian melakukan pencatatan buku kas umum serta ke buku kas pembantu dan membuat laporan keuangan.

Menurut pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 tentang pelaporan keuangan dari organisasi nirlaba, laporan keuangan organisasi meliputi laporan posisi keuangan atau neraca akhir periode pelaporan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, serta catatan atas laporan keuangan. Sebagai alat penyedia informasi keuangan, laporan keuangan harus berdasarkan standar akuntansi yang berterima umum, agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat teruji kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan harus

dibuat sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Peraturan mengenai laporan keuangan khususnya Organisasi nirlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 digantikan dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No.35 yang membahas tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang berlaku mulai dari 01 januari 2020 menyatakan tujuan utama dari laporan keuangan organisasi nonlaba yaitu menyajikan informasi akurat, serta relevan atas kegiatan organisasi tersebut. Dasar perubahan peraturan tersebut adalah bahwa sesungguhnya aktivitas utama organisasi tersebut tidak berorientasi laba, namun bukan berarti tidak memperoleh laba. Namun, dalam penelitian ini penulis menggunakan PSAK No.45 sebagai dasar acuan untuk menentukan penerapan akuntansi di Yayasan, karena penelitian menggunakan laporan keuangan tahun 2018 dan 2019 dan saat itu peraturan yang berlaku masih PSAK No.45.

PSAK No.45 menyatakan bahwa setiap organisasi nirlaba diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas aktivitas ekonominya. Pondok pesantren merupakan salah satu organisasi nirlaba, maka pondok pesantren juga wajib membuat laporan keuangan yang dijelaskan dalam PSAK No. 45. Untuk membuat laporan keuangan harus melewati proses akuntansi yang disebut sebagai siklus akuntansi, proses akuntansi adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap jurnal kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Proses ini diulang untuk setiap periode pelaporan. Dalam melakukan proses pencatatan akuntansi, diperlukan dasar pencatatan

akuntansi, dasar pencatatan akuntansi merupakan dasar yang digunakan sebagai asumsi pencatatan dan pengakuan suatu transaksi. Dasar pencatatan akuntansi secara umum ada dua yaitu basis kas dan basis akrual, basis kas merupakan dasar pencatatan akuntansi yang hanya mencatat transaksi apabila terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, sedangkan basis akrual adalah dasar pencatatan akuntansi yang mencatat transaksi saat terjadinya transaksi tersebut, meskipun kas maupun setara kas belum diterima atau dikeluarkan.

Penelitian Rusdiyanto (2016) dengan judul penelitian “Penerapan PSAK 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al- Huda Sendang Pragaan Sumenep Madura Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa yayasan tersebut belum mengimplementasikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45, oleh karena itu, akuntabilitas keuangannya belum dapat dipercaya oleh donatur.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis berkeinginan melakukan penelitian yang sama pada Yayasan, penulis mengambil objek penelitian di Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al- Miftah Lil Ulum Kabupaten Rokan Hulu untuk mengetahui kesesuaian pencatatan keuangan yang diterapkan oleh Yayasan Pondok Pesantren dengan standar yang berlaku umum.

Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum adalah Yayasan yang beralamat di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun jenis bidang pendidikan yang

ada di Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum adalah pendidikan non formal seperti TPQ dan MDTA. Karena Pondok Pesantren Al-Miftah Lil Ulum termasuk kategori organisasi nirlaba, informasi keuangannya dihasilkan untuk kepentingan pihak manajemen yayasan, donatur dan masyarakat. Tidak hanya itu informasi keuangan yayasan juga dibutuhkan pihak pemerintah.

Sumber pendapatan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum berasal dari spp yang dibayarkan setiap bulannya oleh siswa. Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum juga mendapatkan bantuan sukarela dari donatur. Selain itu setiap tahunnya Pondok Pesantren mendapatkan bantuan dari BumDes (Badan Usaha Milik Desa) setempat. Pendapatan yang diperoleh Pondok Pesantren digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Adapun bentuk pengeluaran Pondok Pesantren biasanya untuk pembayaran insentif guru, pembayaran listrik, konsumsi, biaya kegiatan siswa, biaya pembelian ATK, dan biaya lain-lain.

Proses akuntansi yang dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum meliputi pencatatan semua transaksi yang berhubungan dengan kas masuk dan juga yang berhubungan dengan kas keluar. Setiap transaksi yang terjadi dilakukan pengumpulan atas bukti transaksi kemudian dilakukan pencatatan ke dalam buku kas umum harian (Lampiran 5). Buku kas umum harian Pondok Pesantren terdiri dari kolom tanggal, keterangan, debit, kredit dan saldo. Saat terdapat penerimaan kas seperti pembayaran Spp dari siswa pihak Pondok Pesantren mencatat ke kolom debit. Sedangkan saat pengeluaran kas seperti pembayaran listrik, pembayaran insentif guru ataupun pembelian ATK

akan dicatat di kolom kredit. Pihak Pondok Pesantren belum melakukan penjurnalan serta tidak melakukan pemisahan pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran kas.

Buku kas umum harian tersebut kemudian di rekap dalam bentuk laporan keuangan bulanan (Lampiran 3), dari laporan keuangan bulanan tersebut didapat informasi pendapatan serta pengeluaran yang telah terjadi selama sebulan. Sebagai dasar pencatatan keuangannya Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum menggunakan basis kas (*cash basis*) yaitu pencatatan akuntansi yang hanya mencatat transaksi saat ada penerimaan dan pengeluaran kas saja.

Saldo akun pada laporan keuangan bulanan digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan, laporan keuangan yang disajikan Pondok Pesantren meliputi laporan posisi keuangan (Lampiran 1) dan laporan aktivitas tahunan (Lampiran 2). Laporan posisi keuangan yang disajikan Pondok Pesantren terdiri atas akun-akun aset yaitu aset lancar (kas dan persediaan ATK), nilai persediaan ATK tersebut merupakan penyajian dari sisa ATK yang telah digunakan, Pondok Pesantren tidak mencatat piutang spp di laporan posisi keuangan.

Selain aset lancar di dalam laporan posisi keuangan Pondok Pesantren juga menyajikan aset tetap yang berupa (tanah, bangunan serta peralatan). Kemudian menyajikan akun modal yang terdiri dari aset neto tidak terikat dan terikat sementara. Sedangkan pada laporan aktivitas tahunan Pondok Pesantren menyajikan akun pendapatan yang terdiri dari pendapatan spp, dana donatur dan

juga dana bantuan dari BumDes (Badan Usaha Milik Desa) dan akun biaya operasional seperti biaya pembayaran insentif guru, pembayaran listrik, konsumsi, biaya kegiatan siswa, biaya pembelian ATK, dan biaya lain-lain, kemudian dibandingkan antara jumlah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan.

Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil-Ulum selain membuat laporan keuangan juga membuat daftar aset tetap (Lampiran 4). Pihak Pondok Pesantren tidak menghitung penyusutan aset tetap, hal ini diketahui saat aset tetap seperti bangunan dan peralatan dicatat senilai harga perolehan namun tidak menyajikan akumulasi penyusutan di laporan posisi keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum saat ini hanya laporan posisi keuangan dan juga laporan aktivitas tahunan. Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum tidak membuat laporan arus kas yang sesuai dengan format PSAK No.45 serta catatan atas laporan keuangan juga tidak disajikan sehingga tidak diketahui kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, penyajian aset didalam laporan posisi keuangan dinilai terlalu tinggi, karena tidak membuat jurnal penyesuaian atas penyusutan aset.

Berdasarkan beberapa uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul : **Analisis Penerapan Akuntansi Pada Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum Kabupaten Rokan Hulu.**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, agar penelitian mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“ Bagaimana Kesesuaian Penerapan Akuntansi pada Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum Kabupaten Rokan Hulu dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum ? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pada Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaatnya yaitu :

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan mengenai penerapan dari ilmu akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di sebuah yayasan maupun organisasi nirlaba.

2. Bagi objek penelitian

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang diteliti khususnya mengenai penerapan akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan mengenai Pondok Pesantren sebagai organisasi nirlaba yang wajib membuat laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

4. Bagi penelitian lanjutan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang sejenis serta dapat dijadikan sebagai pembandingan bagi penelitian lebih lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat disempurnakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini, penulis membahasnya menjadi lima bab, yang dapat dilihat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini membahas tentang uraian teori serta konsep dasar yang menjadi acuan untuk mendukung penelitian dan menyajikan hipotesis dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang akan menjabarkan gambaran umum dari objek yang diteliti serta menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta membahasnya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, yang akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang dianggap perlu.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kejadian-kejadian ekonomi tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Dengan kata lain, laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan yang diberikan kepada para pengguna. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi, menjelaskan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu dan kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi merupakan sebuah seni pencatatan, kemudian menggolongkan, mengikhtisarkan, dan melaporkan atas suatu transaksi yang sistematis, dan berdasarkan standar yang berlaku umum.

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) dalam Ernawati dkk (2016) mengartikan akuntansi sebagai sebuah seni mencatat dan meringkas semua transaksi serta kejadian yang bersifat *finansial* dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasilnya.

Menurut *Accounting Principle Boards* (APB) dalam Ernawati dkk (2016) memaknai arti akuntansi sebagai kegiatan jasa yang menghasilkan informasi-informasi kuantitatif dalam bentuk satuan uang, mengenai sebuah badan ekonomi yang bermaksud dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih berbagai alternatif permasalahan.

Menurut Belkoui (2011:50) dalam Ernawati dkk, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian serta pengikhtisaran dengan cara yang sangat signifikan, transaksi-transaksi dan kejadian yang memiliki sifat keuangan.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi adalah suatu proses mulai dari pengidentifikasian data keuangan organisasi, kemudian memproses dan menganalisis semua data secara relevan, diubah menjadi informasi yang akurat serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan organisasi.

2.1.2 Konsep Yayasan

2.1.2.1 Pengertian Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pendirian yayasan diawali dengan pemisahan harta kekayaan pendiri untuk dimasukkan sebagai modal awal

yayasan. Pemisahan harta kekayaan pendiri ke dalam yayasan tidak diberi makna investasi karena secara filosofi pendirian yayasan bersifat nirlaba.

Berdasarkan pernyataan yang tertuang dalam UU No.16 Tahun 2001 yayasan merupakan sebuah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan serta dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, kemanusiaan dan tidak memiliki anggota, yayasan mendirikan badan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut pendapat Ichsan (2010:110) dalam Oktaviani (2020), yayasan tidak memiliki anggota, karena yayasan terbentuk dengan memisahkan harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud (sosial, keagamaan serta kemanusiaan) sedangkan pendirinya dapat berupa pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah, didirikan suatu pengurus untuk mengatur dalam pelaksanaan tujuan tersebut.

Dari beberapa pengertian mengenai yayasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki sifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan serta tidak bertujuan untuk menghasilkan laba.

2.1.2.2 Tujuan Yayasan

Didirikannya sebuah yayasan memiliki tujuan tertentu, menurut UU No.28 Tahun 2004, yayasan mempunyai fungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-

undang tersebut menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan berdasarkan undang-undang. Berikut adalah beberapa kegiatan yayasan :

Kegiatan bidang sosial meliputi :

- a. Pendidikan formal dan non formal
- b. Panti asuhan, panti jompo, panti wreda
- c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium
- d. Pembinaan olahraga
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan
- f. Studi banding

Kegiatan bidang keagamaan meliputi :

- a. Mendirikan sarana ibadah
- b. Mendirikan pondok pesantren
- c. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan
- e. Melaksanakan syiar agama
- f. Studi banding keagamaan

Kegiatan bidang kemanusiaan :

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam
- b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang

- c. Memberi bantuan kepada tunawisma, fakir miskin dan gelandangan
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka
- e. Memberikan perlindungan konsumen
- f. Melestarikan lingkungan hidup

2.1.2.3 Dasar Hukum Yayasan

Borahima (2012;12) dalam Oktaviani (2020), saat umur 56 tahun negara indonesia merdeka tepatnya pada 06 Agustus tahun 2001, dibuat undang-undang yang isinya mengatur tentang sebuah yayasan yaitu undang-undang (UU) Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan diterbitkan dalam Lembaga Negara (LN) No112/2001 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4123. Dan baru berlaku pada 06 agustus tahun 2002. Sebelum peraturan ini diterbitkan tidak ada satupun peraturan undang-undang yang mengatur secara khusus yayasan di negara Republik Indonesia. Dengan demikian, bukan berarti di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur yayasan. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat itu, tidak memberikan rumusan tentang definisi yayasan, status yayasan, hukum yayasan serta cara dan langkah untuk mendirikan sebuah yayasan.

1. Undang-Undang Yayasan No.16 Tahun 2001

Undang-undang No.16 Tahun 2001 ini diharapkan dapat segera mengatasi masalah yang terjadi mengenai yayasan serta dapat menjadi dasar hukum yang kokoh dalam mengatur pelaksanaan yayasan di Indonesia. Ternyata dalam Undang- undang tersebut dalam perkembangannya belum memenuhi seluruh kebutuhan, perkembangan hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukannya

perubahan terhadap Undang - Undang tersebut. Perubahan itu bertujuan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang besar untuk seluruh lapisan masyarakat.

2. Undang-undang Yayasan No.28 Tahun 2004

Undang - Undang No.28 Tahun 2004 menyempurnakan Undang - Undang No.16 Tahun 2001, Undang-Undang ini ditujukan untuk menjamin kepastian serta ketertiban hukum, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai yayasan, hal tersebut dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan. Selain dari sebuah hukum kebiasaan, doktrin serta yurisprudensi dan Undang - Undang yayasan digunakan sebagai dasar hukum yayasan dalam hukum yang positif, masalah yayasan eksplisit tidak menyajikan suatu rincian yang pasti sebagai suatu dasar pijakan.

Berbeda dengan Belanda, yang secara tegas didalam Undang - Undangnya menyatakan bahwa yayasan adalah sebagai badan hukum. Meskipun tidak disebutkan secara tegas, sebuah yayasan di Indonesia telah diakui sebagai badan hukum. Pengakuan tersebut didasarkan dari kebiasaan serta yurisprudensi. Agar diakui sebagai sebuah badan hukum, yayasan harus memahami persyaratan tertentu yaitu Borahima, (2012;14) dalam Oktaviani (2020) :

1. Syarat-syarat materil terdiri dari, harus adanya pemisahan dari harta kekayaan, adanya tujuan, serta mempunyai organisasi

2. Syara-syarat formil nya yaitu harus memiliki akta autentik

Dalam praktek hukum yang sedang berlaku di Indonesia, umumnya yayasan berdiri menggunakan akta notaris. Akta notaris tersebut, didaftarkan pengadilan negeri serta diumumkan di Berita Negara. Hal ini karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik sehingga bebas bentuk. Dengan itu, yayasan juga dapat berdiri dengan adanya akta dibawah tangan.

Setelah resminya Undang - Undang Yayasan, otomatis untuk proses penentuan status dari badan hukum yayasan perlu mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang - Undang Yayasan tersebut. Di Undang - Undang Yayasan disebutkan bahwa yayasan dapat menyandang status badan hukum saat akta pendirian memperoleh pengesahan Menteri. Ketentuan UU No.28 Tahun 2008 dapat disimpulkan ada beberapa syarat pendirian sebagai berikut :

1. Didirikan oleh 1 (satu) orang anggota maupun lebih
2. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan milik pendirinya
3. Perlu dilakukan dengan akta notaris serta dibuat dengan bahasa Indonesia
4. Perlu memperoleh pengesahan dari menteri
5. Lalu, diumumkan didalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
6. Dilarang mamakai nama yang telah digunakan secara sah oleh yayasan lainnya, ataupun yang bertentangan dengan ketertiban umum / kesusilaan
7. Yayasan yang didirikan harus diawali menggunakan kata “Yayasan”

Yayasan yang belum terdaftar, perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu, lalu menyesuaikan dengan anggaran dasar. Untuk persyaratan pendaftaran

merupakan hal yang kontradiktif karena di Undang - Undang Yayasan No.16 Tahun 2001 tidak ada perihal kewajiban yayasan baru untuk didaftarkan setelah mendapat pengesahan dari Menteri. Kewajiban yayasan setelah disahkan hanyalah kewajiban untuk melakukan pengumuman di dalam Berita Negara. Dan seharusnya untuk penekanan aturan peralihan bukan pada pendaftaran, melainkan pada syarat jumlah minimal kekayaan yang dimiliki serta prospek dari kegiatan yayasan itu.

Yayasan yang tidak memenuhi syarat jumlah dari minimal kekayaan yang harus dimiliki oleh yayasan atau prospek kegiatan, tidak mungkin bisa untuk dikembangkan, yayasan tersebut dapat saja dibubarkan. Dengan itu untuk kerugian yang timbul baik untuk organisasi yayasan maupun pihak ketiga dapat dikurangi.

2.1.2.4 Sumber Pembiayaan / Kekayaan

Untuk memulai operasinya yayasan juga butuh pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan yayasan biasanya dari kekayaan yang terpisah dalam bentuk satuan uang maupun barang. Yayasan juga dapat memperoleh sumbangan dan bantuan yang bersifat tidak mengikat, berupa : (a) Wakaf merupakan harta kekayaan yang diserahkan ataupun dikelola sendiri maupun dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Yayasan menerima wakaf berupa barang atau benda lainnya supaya dapat dikelola dengan sebaik mungkin. (b) Hibah bersifat pengajuan dari pihak yayasan itu sendiri, biasanya dapat berasal dari pihak instansi maupun yayasan lain. Tidak hanya itu dana hibah juga memiliki

konsekuensi untuk pertanggungjawaban berupa laporan terkait dengan penerimaan serta realisasi dari hibah. (c) Hibah wasiat itu bantuan yang diberikan oleh seseorang ataupun instansi untuk pihak yayasan karena adanya wasiat seseorang yang telah meninggal dunia. Bantuan tersebut diberikan agar yayasan bisa berkembang dan maju untuk lebih besar lagi. (d) dan perolehan yang tidak bertentangan dengan adanya aturan anggaran dasar yayasan atau peraturan dari perundang – undangan yang sedang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa, pihak yayasan memperoleh sumber daya untuk aktivitas operasinya dari berbagai sumbangan, bantuan yang bersifat tidak mengikat, waqaf, hibah serta perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar, yayasan tidak mempunyai kepemilikan ataupun anggota, sehingga saat mendapat untung dapat digunakan untuk proses pengembangan layanan yayasan.

2.1.2.5 Struktur Organisasi Yayasan

Struktur organisasi yayasan adalah turunan dari fungsi, strategi serta tujuan organisasi. Menurut Undang - Undang No.16 Tahun 2001, yayasan memiliki bagian organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, Pengawas.

Pembina itu adalah organ paling tinggi didalam yayasan, karena memiliki kewenangan yang tidak dapat dipindah tangankan ke organ yayasan lainnya yaitu pengurus maupun pengawas, pihak yang dapat dilantik menjadi anggota Pembina yaitu individu dari pendiri yayasan atau yang berdasarkan keputusan dengan rapat anggota, yang dinilai memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan dari

yayasan. Anggota dari Pembina tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai anggota pengurus serta pengawas.

Pengurus merupakan salah satu unsur dari organ-organ yayasan yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kegiatan serta kepengurusan yayasan tersebut. Yang memiliki wewenang untuk mengerjakan tugas kepengawasan terhadap tindakan yang dilakukan saat kepengurusan yayasan yang dilakukan oleh pengurus adalah seorang Pengawas.

Masing-masing dari organ yayasan memiliki tugas serta wewenang yang berbeda antar satu organ dengan organ lain. Pemisahan tegas antara fungsi, wewenang serta tugas masing-masing organ yayasan tersebut dan hubungan antar organ yayasan bermaksud untuk menghindari adanya konflik organ yayasan itu sendiri dan tidak hanya menimbulkan kerugian yayasan melainkan juga dapat merugikan pihak ketiga.

2.1.3 Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan keislaman dengan sistem asrama atau biasa disebut juga sebagai pondok, kyai menjadi bagian paling khas dari pondok pesantren, masjid digunakan untuk pusat kegiatan dan belajar agama islam yang dibimbing oleh kyai dan diikuti santri sebagai kegiatan pokoknya. Pondok pesantren dapat juga dimaknai laboratorium kehidupan. Tempat untuk santri belajar hidup serta belajar bermasyarakat dalam berbagai bidangnya.

Peraturan dari Menteri Agama Nomor 03 pada Tahun 1979 membagi pondok pesantren menjadi :

- a. Bagian satu : Pondok Pesantren Tipe A, yaitu pondok pesantren dengan santri belajar serta bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan sistem pengajaran secara tradisional (sistem wetonan atau sorongan)
- b. Bagian dua : Pondok Pesantren Tipe B, yaitu pondok pesantren yang melakukan belajar mengajar secara klasikal dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. santri tinggal dan berada di asrama lingkungan pondok pesantren
- c. Bagian tiga : Pondok Pesantren Tipe C, yaitu pondok pesantren yang hanya merupakan asrama sedangkan santri belajar di luar (di madrasah atau sekolah umum lainnya). Kyai hanya melakukan pengawasan dan sebagai pembina para santri
- d. Bagian empat : Pondok Pesantren Tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah ataupun sistem madrasah

Pengertian dari pondok pesantren sebagai entitas pelapor merupakan pondok pesantren yang berbadan hukum yayasan. Sebagai entitas pelaporan, aset/harta serta liabilitas/utang dari pondok pesantren harus dibedakan dengan aset/harta dan liabilitas/utang entitas lain baik itu organisasi maupun perseorangan.

2.1.4 Dasar Pencatatan Akuntansi

Setiap perusahaan pasti menjalankan proses akuntansi untuk kelangsungan bisnisnya. Dalam proses akuntansi tersebut, perusahaan akan melakukan pencatatan sehingga semua hal mengenai keuangan perusahaan dapat di data dan dicatat dengan baik. Pada dasarnya pencatatan akuntansi terdiri dari dua metode yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Berikut penjelasan mengenai kedua metode pencatatan tersebut :

a. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh dari sebuah transaksi, peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk mengakui pendapatan, belanja serta pembiayaan. Konsep *cash basis* diterapkan pada hal berikut ini :

1) Pengakuan untuk Pendapatan

Pendapatan akan diakui saat perusahaan telah menerima pembayaran secara kas/ tunai. Menjadi hal yang kurang penting terkait kapan muncul hak menagih. Maka pada metode ini muncul adanya metode untuk menghapus piutang secara langsung.

2) Pengakuan untuk Beban/Biaya

Pengakuan terkait dengan biaya biasanya dilakukan ketika adanya pembayaran secara kas/tunai.

b. Basis Akrual (*Accrual Basis*)

Merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lain saat transaksi atau peristiwa itu terjadi, tanpa adanya perhatian kapan kas dan setara kas diterima maupun dibayar. Konsep dasar *accrual basis* diterapkan pada aspek berikut :

1) Pengakuan untuk Pendapatan

Hal tersebut akan diakui saat perusahaan memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penagihan atas kegiatan usaha seperti penjualan jasa maupun barang. Pengakuan pendapatan tersebut tidak menunggu ketika kas diterima sehingga mungkin akan terjadinya piutang tak tertagih.

2) Pengakuan untuk Beban/Biaya

Hal tersebut akan diakui saat perusahaan telah mempunyai kewajiban untuk membayar meski perusahaan belum melakukan pembayaran.

2.1.5 Siklus Akuntansi

Proses akuntansi merupakan sebuah proses dari pengolahan data sejak saat terjadinya transaksi. Setiap transaksi harus memiliki bukti sebagai dasar pencatatan. Transaksi yang berdasarkan bukti kemudian di input dan di proses sehingga menghasilkan *output* berupa informasi dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi dalam proses pengolahan data dapat menggunakan arus, proses akuntansi yang dimulai sejak transaksi hingga tahap pelaporan. Akuntansi memiliki siklus yang disebut *Accounting Cycle*, yang akan memproses bukti transaksi menjadi sebuah bentuk informasi dikenal sebagai laporan keuangan kemudian dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Baridwan (2013:48) dalam Oktaviani (2020), siklus akuntansi merupakan tahap-tahap kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan.

Menurut Warren (2017:175) langkah-langkah untuk menyelesaikan siklus akuntansi adalah sebagai berikut :

- 1) Menganalisis serta mencatat transaksi kedalam jurnal
Langkah pertama kali yang dilakukan dalam siklus akuntansi adalah menganalisis serta mencatat transaksi ke dalam jurnal dengan sistem akuntansi jurnal berpasangan.
- 2) Mem-*posting* transaksi ke buku besar
Secara periodik, transaksi yang telah dicatat dalam jurnal dipindahkan ke akun-akun dalam buku besar. Debit dan kredit untuk setiap jurnal dipindahkan (di *posting*) ke dalam akun sesuai dengan urutan tanggal terjadinya di dalam jurnal.
- 3) Menyiapkan neraca saldo yang belum dilakukan penyesuaian
Neraca saldo tersebut disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan (*error*) dalam *posting* debit dan kredit ke buku besar. Neraca saldo menunjukkan jumlah debit sama dengan jumlah sisi kredit. Namun, manfaatnya tetap ada karena kesalahan sering neraca saldo ini tidak sama, maka ada kesalahan yang harus ditemukan atau perlu dilakukan koreksi.
- 4) Menyiapkan serta melakukan analisis data penyesuaian
Sebelum laporan keuangan dapat disajikan, akun-akun harus dimutakhirkan. Empat jenis akun yang biasanya memerlukan penyesuaian termasuk beban dibayar dimuka, pendapatan diterima dimuka, pendapatan yang masih akan diterima (piutang usaha) dan akrual beban (beban yang masih terutang). Selain itu beban penyusutan harus dicatat untuk semua aset tetap selain tanah.
- 5) Menyiapkan kertas kerja (*worksheet*) akhir periode
Walaupun kertas kerja akhir periode tidak diperlukan, kertas kerja ini berguna dalam menunjukkan alur informasi akuntansi dari neraca saldo yang belum disesuaikan ke neraca saldo yang telah disesuaikan dan laporan keuangan. Selain itu, kertas kerja akhir periode berguna untuk menganalisis pengaruh penyesuaian yang diajukan terhadap laporan keuangan.
- 6) Membuat ayat jurnal penyesuaian lalu *posting* ke buku besar
Ayat jurnal penyesuaian memengaruhi paling tidak satu akun laporan laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Penjelasan untuk setiap

penyesuaian termasuk perhitungannya biasanya disertakan dalam setiap ayat jurnal penyesuaian.

- 7) Menyiapkan neraca saldo setelah adanya penyesuaian
Setelah semua ayat jurnal penyesuaian dibuat dan dipindahkan, neraca saldo yang disesuaikan disiapkan untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo pada sisi debit dan sisi kredit. Hal ini merupakan langkah akhir sebelum menyelesaikan laporan keuangan, semua kesalahan yang timbul akibat proses pemindahan ayat jurnal penyesuaian harus ditemukan dan diperbaiki.
- 8) Menyiapkan laporan keuangan
Hal penting dari siklus akuntansi adalah menyajikan laporan keuangan. Laporan laba rugi disiapkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan disajikan langsung dari neraca saldo yang telah disesuaikan, kertas kerja akhir periode, atau buku besar. Untuk laba atau rugi neto yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi disajikan dalam laporan ekuitas pemilik bersama dengan penambahan investasi dan juga penarikan oleh pemilik/ *prive*. Saldo akhir modal pemilik dilaporkan di Laporan Posisi Keuangan dan ditambah dengan jumlah liabilitas untuk menyamakan aset.
- 9) Membuat ayat jurnal penutup dan mem- *posting* ke buku besar
Empat ayat jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi agar akun-akun siap digunakan kembali pada periode berikutnya. Empat ayat jurnal penutup tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Pendapatan didebit sebesar saldonya dan mengkredit ikhtisar laba rugi
 2. Beban di kredit sebesar saldonya dan mendebit ikhtisar laba rugi
 3. Untuk ikhtisar laba rugi didebit sebesar saldonya dan mengkredit modal pemilik
 4. *Prive* atau pengambilan pribadi oleh pemilik dikredit dan mendebit modal pemilik

Ayat jurnal penutup di buku besar ditulis secara singkat sebagai "Penutup". Selain itu biasanya satu baris akan ditambahkan di kolom debit dan kredit setelah ayat jurnal penutup di-*posting*. Baris ini akan memisahkan transaksi pendapatan, beban, dan *prive* periode selanjutnya dengan periode sekarang.
- 10) Menyelesaikan neraca saldo setelah penutupan
Langkah terakhir dalam siklus akuntansi adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dari neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah sesuai pada awal periode berikutnya. Semua akun beserta saldo dalam neraca saldo setelah penutupan harus sama dengan akun dan saldo di laporan posisi keuangan pada akhir periode.

2.1.6 Konsep Akuntansi Aset Tetap

2.1.6.1 Pengertian Aset Tetap

Menurut Reeve, Warren dan Duchac (2012:2) dalam Rasyid (2016), aset tetap (*fixed asset*) merupakan aset yang bersifat jangka panjang atau relatif bersifat permanen serta dapat digunakan jangka panjang. Aset tetap digunakan perusahaan dan tidak untuk diperjual belikan dan digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menyatakan bahwa aset tetap yaitu *asset* berwujud yang :

1. Dimiliki dan digunakan dalam aktivitas produksi, penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administrasi.
2. Diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi

Menurut Sodikin, (2013:145) dalam Rasyid (2016) menyatakan bahwa suatu aset tetap tergolong sebagai aset tetap apabila ia memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Berwujud fisik seperti tanah, bangunan serta peralatan
2. Dapat untuk memproduksi, menyediakan barang dan jasa, lalu dapat juga disewakan kepada orang lain atau untuk tujuan administrasi tertentu
3. Memiliki umur ekonomis lebih dari satu periode pelaporan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa aset tetap merupakan harta yang dimiliki organisasi maupun perusahaan serta dapat dilihat secara langsung keberadaannya. Digunakan untuk kepentingan produksi, menyediakan barang atau jasa, untuk

disewakan ke pihak lain atau untuk kepentingan administrasi dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode pelaporan akuntansi.

2.1.6.2 Klasifikasi Aset Tetap

Dalam PSAK No.16 perbaikan (IAI,2015:16) dalam Rasyid (2016) mengklasifikasikan aset tetap menurut kelasnya, dimana suatu entitas aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut adalah contoh dari kelas tersendiri :

1. Tanah
2. Tanah dan bangunan
3. Mesin
4. Kapal
5. Pesawat udara
6. Kendaraan bermotor
7. Perabotan
8. Peralatan kantor

2.1.6.3 Pengakuan atas Aset Tetap

Dalam ketentuan SAK ETAP bab 15 par. 15.4 (IAI, 2009:68) dalam Rasyid (2016), entitas harus menerapkan kriteria dan pengakuan dalam menentukan pengakuan atas aset tetap. Oleh karena itu, entitas wajib mengakui biaya perolehan atas aset tetap sebagai aset tetap jika :

1. Kemungkinan saat manfaat ekonomi terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke dalam entitas

2. Pos tersebut mempunyai nilai dan juga biaya yang dapat diukur dengan andal.

2.1.6.4 Pengukuran atas Aset Tetap

A. Pengukuran saat pengakuan aset tetap

Dalam pernyataan SAK ETAP bab 15 par. 6 (IAI, 2009:68) menjelaskan bahwa pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan, biaya aset tetap meliputi :

1. Harga beli, termasuk biaya hukum, broker, bea impor dan juga pajak pembelian yang tidak boleh di kreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain
2. Biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi yang diinginkan agar aset siap untuk digunakan sesuai dengan maksud manajemen perusahaan
3. Estimasi awal biaya pembongkaran atas aset, biaya pemindahan aset dan juga biaya restorasi lokasi.

Sodikin (2013:147), dalam Rasyid (2016) memaparkan ada berbagai cara memperoleh atau mendapatkan aset tetap yang mempengaruhi penentuan biaya perolehan sebagai berikut :

1. Pembelian tunai, untuk pembelian tunai biaya perolehan aset tetap adalah harga faktur bersih kemudian dikurangi dengan potongan tunai. Potongan tunai dari harga faktur harus dikurangi terlepas apakah potongan itu dimanfaatkan atau tidak.

2. Pembelian tangguhan, pembelian tangguhan jangka panjang pada umumnya akan melibatkan bunga. Bunga diterapkan secara eksplisit dan implisit. Bunga eksplisit adalah bunga yang diterapkan terus terang sedangkan bunga implisit merupakan tingkat bunga yang diterapkan tidak terus terang, baik eksplisit maupun implisit bunga tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya perolehan karena bukan pengorbanan untuk memperoleh aset tetap, tetapi pengorbanan untuk menggunakan dana pihak lain.
3. Pembelian gabungan, dalam dunia bisnis dapat terjadi pembelian aset tetap secara gabungan, biaya aset tetap ditentukan berdasar metode pasar relative.
4. Sumbangan pemerintah, untuk memperoleh sumbangan ini tidak ada pengorbanan yang dilakukan, akuntansi akan tetap mengakuinya karena akuntansi adalah suatu alat pertanggungjawaban sehingga aset diukur untuk pertama kali pada saat nilai wajar aset pada saat sumbangan tersebut diterima.
5. Dibangun sendiri, biaya perolehan atas aset tetap yang dibangun sendiri oleh perusahaan meliputi biaya bahan bangunan yang dipakai, upah tenaga kerja langsung dan biaya lain seperti pemakaian atas listrik serta depresiasi aset tetap perusahaan yang digunakan untuk membangun.
6. Pengeluaran saham biasa, aset tetap dapat diperoleh dengan menggunakan saham. Pengukuran saham sebesar nilai wajar aset atau nilai wajar saham biasa, mana yang lebih dapat ditentukan pada saat terjadi pertukaran.

7. Pertukaran aset tetap, untuk hal pertukaran aset tetap memiliki substansi komersial dan juga tidak memiliki substansi komersial. Apabila pertukaran memiliki substansi komersial, maka biaya perolehan atas aset tetap baru adalah nilai wajarnya. Untung (rugi) pertukaran diakui serta diukur sebesar selisih nilai wajar aset lama dan nilai buku.

B. Pengukuran setelah pengakuan

Dalam SAK ETAP bab 15 par. 14-15 (IAI, 2009:71) dalam Rasyid (2016) memaparkan bahwa sebuah entitas harus mengukur keseluruhan aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai aset. Penilaian kembali atau revaluasi aset tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran aset. Penyimpangan ketentuan ini mungkin dilakukan atas dasar ketentuan pemerintah. Dalam hal tersebut pelaporan keuangan harus memaparkan mengenai penyimpangan terhadap gambaran keuangan dari entitas.

2.1.6.5 Penyusutan atas Aset Tetap

Menurut Kieso (2017) penyusutan adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset aset berwujud kepada beban secara sistematis dan rasional pada periode-periode di mana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset.

Dalam SAK ETAP bab 15 par.17-18, 22 (IAI, 2009:71-73) dalam Rasyid (2016) menyebutkan bahwa beban penyusutan aset harus diakui dalam laporan

laba rugi. Entitas harus melakukan alokasi jumlah aset yang dapat disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Entitas harus memilih metode penyusutan yang digunakan agar mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset.

Menurut Kieso (2017) berikut adalah beberapa metode menghitung penyusutan aset tetap :

1. Metode aktivitas (unit penggunaan atau unit produksi)

Metode aktivitas (*activity method*) disebut juga sebagai pendekatan pembebanan variabel atau pendekatan unit produksi mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas, dan bukan fungsi dari berlalunya waktu. Perusahaan menganggap umur aset dalam hal *output* yang dihasilkan (jumlah unit yang dihasilkan), atau ukuran *input* seperti jumlah jam kerja mesin. Metode aktivitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{(\text{Biaya perolehan} - \text{nilai residu}) \times \text{Jumlah jam tahun ini}}{\text{Total estimasi jam}}$$

2. Metode garis lurus (*straight line metod*)

Metode garis lurus menganggap penyusutan sebagai fungsi waktu dan bukan fungsi penggunaan. Perusahaan menggunakan metode ini karena sederhana. Metode garis lurus dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{biaya perolehan dikurangi nilai residu}}{\text{estimasi umur manfaat}}$$

3. Metode pembebanan menurun (dipercepat)

Metode pembebanan menurun (*dimishing-charge method*) menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan beban yang lebih rendah dalam tahun-tahun berikutnya. Metode ini memungkinkan beban awal tahun yang lebih tinggi daripada metode garis lurus. Metode pembebanan menurun dapat dibagi 2 yaitu :

a. Jumlah angka tahun (*sum-of-the-year's-digital method*)

Metode jumlah angka tahun menghasilkan pembebanan yang menurun berdasarkan pada penurunan fraksi biaya perolehan yang dapat disusutkan (biaya perolehan asli dikurangi nilai residual). Setiap fraksi menggunakan jumlah dari tahun sebagai penyebut ($5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$). Pembilangnya adalah jumlah tahun perkiraan sisa umur pada awal tahun. Dalam metode ini, angka pembilang akan menurun dari tahun ke tahun, sedangkan penyebutnya tetap konstan ($5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15$). Pada akhir umur manfaat aset, sisa saldo harus sama dengan nilai residual.

b. Metode saldo menurun (*declining-balanced method*)

Metode saldo menurun disebut juga sebagai metode saldo berkurang menggunakan tingkat penyusutan (sebagai persentase) yang berupa beberapa kali tingkat penyusutan pada metode garis lurus. Misalnya, tingkat menurun ganda untuk aset berumur 10 tahun adalah 20 persen (dua kali lipat dari tingkat garis lurus, yaitu $1/10$ atau 10 persen). Perusahaan menerapkan tingkat penyusutan yang konstan atas nilai buku yang

menurun setiap tahunnya. Tidak seperti metode lain, metode saldo menurun tidak mengurangi nilai residual dalam menghitung dasar penyusutan. Tingkat saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aset pada awal setiap periode. Oleh karena beban penyusutan mengurangi nilai buku aset setiap periodenya, penggunaan tingkat saldo menurun yang konstan atau nilai buku yang terus menerus berkurang akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih rendah seiring berjalannya waktu. Proses ini berlanjut sampai nilai buku aset sama dengan estimasi nilai residualnya, pada saat itu perusahaan tidak akan melanjutkan penyusutan lagi.

Aset tetap akan disusutkan agar perusahaan dapat mengetahui bahwa nilai aset tetap tercatat tidak dapat mewakili nilai manfaat yang dimiliki oleh aset tersebut (Yulianti, 2015:5). Menurut Pontoh (2013:358) dalam Rasyid (2016) faktor yang perlu diperhatikan saat menghitung beban penyusutan aset adalah:

1. Biaya perolehan (*initial cost/ capitalized cost*), yaitu jumlah atas keseluruhan biaya yang dikeluarkan sebuah organisasi bisnis untuk memperoleh aset tetap.
2. Umur manfaat (*useful life*), merupakan estimasi atau perkiraan lamanya waktu penggunaan atas aset tersebut.
3. Nilai sisa / residu (*residual value/scrap value/salvage value/trade-in value*) merupakan estimasi nilai tunai aset tetap yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

4. Jumlah biaya yang dapat disusutkan/ jumlah tersusutkan (*Asset's depreciable cost*) yaitu selisih antara biaya perolehan aset dengan nilai residu aset. Jumlah tersebut akan dialokasikan sebagai beban penyusutan.
5. Jumlah tercatat/ nilai buku (*book value*) merupakan selisih antara nilai biaya perolehan aset dengan akumulasi penyusutan aset.

2.1.6.6 Pengeluaran atas Aset Tetap

Dalam SAK ETAP bab 15 par, 14 (IAI, 2009:71) dalam Rasyid (2016) memaparkan bahwa sebuah entitas harus mengakui adanya biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari (*cost of day-to-day servicing*) dari aset tetap sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

Pengeluaran utama yang dilakukan terhadap aset tetap setelah perolehan meliputi (Surya, 2012:185) dalam Rasyid (2016) :

1. Pemeliharaan dan juga reparasi
2. Penambahan
3. Penggantian serta perbaikan
4. Reparasi besar
5. Penyusunan dan juga pemasangan kembali

Effendi (2014:235) dalam Rasyid, (2016) memaparkan bahwa pengeluaran selama kepemilikan aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran modal (*capital expenditure*) yaitu suatu pengeluaran manfaat lebih dari satu periode akuntansi, bisa menambah kapasitas, nilai relative tinggi, pengeluaran dicatat dalam rekening aset (dikapitalisasi)

2. Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang masa manfaatnya kurang dari satu periode pelaporan akuntansi, tidak menambah kapasitas serta nilai relatif kecil, pengeluaran ini akan dicatat dalam rekening beban (tidak dikapitalisasi)

2.1.6.7 Pelepasan atas Aset Tetap

SAK ETAP memaparkan bab 15 par, 27 (IAI, 2009:74) dalam Rasyid (2016) entitas harus menghentikan pengakuan atas aset tetap ketika :

1. Dilepaskan
2. Saat tidak adanya manfaat ekonomi yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya

Effendi (2014:240) dalam Rasyid (2016), menjelaskan aset tetap yang sudah tidak digunakan dapat ditarik dari pemakaian, penarikan dapat dilakukan dengan cara :

1. Aset dijual
2. Aset ditukar dengan aset yang lain
3. Aset dibuang (dihapuskan)

2.1.6.8 Penyajian serta Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap disajikan sesuai nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan serta akumulasi kerugian atas penurunan nilai aset. Menurut SAK ETAP bab 15 par 31 (IAI, 2009:75) dalam Rasyid (2016) entitas harus mengungkapkan setiap kelompok aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar melakukan pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto
2. Metode penyusutan yang diterapkan
3. Umur manfaat yang digunakan
4. Jumlah tercatat bruto dan juga akumulasi penyusutan aset (agregat dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan juga akhir periode akuntansi
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan juga akhir periode yang menunjukkan :
 - a. Penambahan
 - b. Pelepasan
 - c. Kerugian penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan dalam laporan laba rugi sesuai dengan SAK ETAP bab 22 penurunan nilai aset
 - d. Penyusutan
 - e. Perubahan lain

2.1.7 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba PSAK No. 45

Laporan keuangan adalah suatu dasar upaya analisis atas suatu perusahaan. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan di standar akuntansi keuangan (SAK) disebutkan bahwa pengguna laporan keuangan yang dimaksud meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya masyarakat.

Menurut PSAK No.01 tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang diberikan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi entitas yang meliputi :

“Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas”.

Berdasarkan definisi laporan keuangan diatas, peneliti dapat menyimpulkan laporan keuangan merupakan suatu kerangka dasar dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan seperti investor, karyawan, kreditor, pemasok, pemberi pinjaman serta pemerintah dalam hal menilai aktivitas ekonomi dan pengambilan keputusan organisasi.

Menilai pentingnya suatu laporan keuangan bagi organisasi, laporan keuangan untuk organisasi nirlaba juga telah diatur dalam PSAK 45. Komponen laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK No.45 Tahun 2015 dalam Rusdiyanto (2016) adalah sebagai berikut:

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan alat untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan juga aset neto serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut dalam waktu tertentu. Informasi yang disajikan

dalam laporan posisi keuangan lainnya dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai :

- a. Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan
- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan dalam memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Menyediakan informasi terkait dengan aset, liabilitas, dan juga aset neto serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu siklus akuntansi tertentu.

Menurut PSAK No. 45 berikut adalah contoh format laporan posisi keuangan:

Tabel 2.1

Format Laporan Posisi Keuangan Entitas Nirlaba

Entitas Nirlaba	
Laporan Posisi Keuangan	
31 Desember 20X1	
Aset	
Kas dan Setara Kas	Rp.-
Piutang Bunga	Rp.-
Persediaan dan biaya dibayar dimuka	Rp.-
Piutang lain-lain	Rp.-
Investasi lancar	Rp.-
Properti investasi	Rp.-
Aset tetap	Rp.-
Investasi jangka panjang	<u>Rp.-</u>
Jumlah Aset	Rp.-
Liabilitas dan Aset Neto	
Utang dagang	Rp.-
Pendapatan diterima dimuka	Rp.-
Utang jangka panjang	<u>Rp.-</u>
Jumlah Liabilitas	Rp.-
Aset Neto	
Tidak terikat	Rp.-
Terikat temporer	Rp.-
Terikat permanen	Rp.-
Jumlah aset neto	<u>Rp.-</u>
Jumlah liabilitas dan aset neto	Rp.-

Sumber : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45

2) Laporan Aktivitas

Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan laporan lainnya, dapat

membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan kembali, anggota, kreditur, dan pihak lainnya untuk:

- a. Mengevaluasi kinerja dalam satu periode
 - b. Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa.
 - c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer
- Menyediakan informasi terkait dengan pengaruh transaksi, hubungan antar transaksi, sehingga dapat diketahui kinerja operasional selama periode akuntansi.

Menurut PSAK No. 45 format laporan aktivitas yang seharusnya dibuat organisasi nirlaba adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Format laporan aktivitas Entitas Nirlaba

Entitas Nirlaba Laporan Aktivitas Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X1	
Perubahan aset neto tidak terikat	
Pendapatan dan penghasilan	
Sumbangan	Rp.-
Jasa layanan	Rp.-
Penghasilan investasi jangka panjang	Rp.-
Penghasilan investasi lain-lain	Rp.-
Jumlah pendapatan dan penghasilan tidak terikat	Rp.-
Beban dan kerugian	
Program A	Rp.-
Program B	Rp.-
Program C	Rp.-
Manajemen dan umum	Rp.-
Kerugian akibat kebakaran	Rp.-
Jumlah beban dan kerugian	Rp.-
Kenaikan aset neto	Rp.-
Aset neto pada awal tahun	Rp.-
Aset neto pada akhir tahun	Rp.-

Sumber : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45

3) Laporan Arus Kas

Tujuan utama dari disajikannya laporan arus kas adalah untuk mengetahui informasi mengenai penerimaan serta pengeluaran kas dalam satu periode, dalam penyajiannya pada laporan arus kas organisasi nirlaba disajikan sesuai PSAK Nomor 2 tahun 2015 tentang laporan arus kas. Laporan arus kas dilaporkan dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan organisasi

nirlaba. Organisasi nirlaba wajib melaporkan arus kas dan juga aktivitas operasinya dengan menggunakan salah satu metode berikut :

a. Metode langsung

Dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas *bruto* dan pengeluaran kas *bruto* diungkapkan.

b. Metode tidak langsung

Dengan metode ini laba maupun rugi disesuaikan dengan cara mengoreksi pengaruh dan transaksi non kas, penangguhan (*deferral*) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus kas investasi dan pendanaan.

Menurut PSAK No.45 format laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Format laporan arus kas Entitas Nirlaba

Entitas Nirlaba	
Laporan Arus Kas	
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X1	
Aliran kas dari aktivitas operasi	
Kas dari pendapatan jasa	Rp.-
Kas dari penyumbang	Rp.-
Kas dari piutang lain-lain	Rp.-
Bunga dan dividen yang diterima	Rp.
Penerimaan lain-lain	Rp.-
Bunga yang dibayarkan	(Rp.-)
Kas yang dibayar ke karyawan	(Rp.-)
Hutang lain-lain yang dilunasi	<u>(Rp.-)</u>
Kas neto yang diterima atau (digunakan) untuk aktivitas operasi	Rp.-

Aliran kas dari aktivitas investasi	Rp.-
Ganti rugi dan asuransi kebakaran	Rp.-
Pembelian peralatan	Rp.-
Penerimaan dari penjualan investasi	<u>Rp.-</u>
Pembelian investasi	Rp.-
Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi	
Aliran kas dari aktivitas pendanaan	Rp.-
Penerimaan dari kontribusi terbatas dari	Rp.-
Investasi dalam endowment	Rp.-
Investasi dalam endowment berjangka	Rp.-
Investasi bangunan	Rp.-
Investasi perjanjian tahunan	Rp.-
Aktivitas pendanaan lain	
Bunga dan dividen terbatas untuk reinvestasi	Rp.-
Pembayaran kewajiban tahunan	(Rp.-)
Pembayaran utang wesel	(Rp.-)
Pembayaran liabilitas jangka panjang	<u>(Rp.-)</u>
Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan	Rp.-
Kenaikan (penurunan) neto dalam kas dan setara kas	Rp.-
Kas dan setara kas pada awal tahun	<u>Rp.-</u>
Kas dan setara kas pada akhir tahun	Rp.-

Sumber : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) bertujuan untuk memberi informasi mengenai perkiraan yang dinyatakan di dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan yang dilampirkan bersamaan dengan laporan keuangan dan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas,

catatan atas laporan keuangan memberi penjelasan naratif dari pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (PSAK No.1 tahun 2015). Menurut PSAK No.45 Tahun 2015 catatan atas laporan keuangan memuat hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum mengenai lembaga
- b. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
- c. Penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut
- d. Kejadian setelah tanggal neraca

Informasi tambahan lain yang dianggap perlu, baik yang bersifat kuantitatif ataupun yang bersifat kualitatif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara detail terkait laporan keuangan yang ada di Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas informasi pada laporan keuangan selama siklus akuntansi.

2.1.8 ISAK No.35 tentang Laporan Keuangan Entitas Nonlaba

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 terkait dengan pelaporan keuangan organisasi nonlaba diganti dengan ISAK (Interpretasi standar akuntansi keuangan) No.35 tentang penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (berlaku efektif 1 Januari 2020) memaparkan tujuan utama dari laporan keuangan organisasi nonlaba yakni menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Istilah *not for profit*, semula terdapat pada PSAK No.45 kemudian dirubah oleh DSAK IAI dalam ISAK No.35 menjadi nonlaba dengan dasar asumsi bahwa sesungguhnya

aktivitas utamanya tidak berorientasi untuk mencari laba, namun bukan berarti tidak menghasilkan laba (nirlaba).

ISAK No.35 mengatur terkait penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 05 yang memberikan contoh entitas berorientasi nonlaba menjadi penyesuaian baik: (a) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk hubungan dua arah antara masyarakat dan pos tertentu dalam laporan keuangan, dan (b) penyesuaian deskripsi yang diterapkan untuk laporan keuangan itu sendiri. ISAK 35 juga dilengkapi dengan contoh ilustratif serta dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari ISAK 35.

Menurut ISAK No.35 dalam Yanuarisa (2020), laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan yaitu untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih, dan juga informasi terkait hubungan unsur tersebut pada waktu tertentu. pengungkapan dan informasi dalam laporan posisi keuangan serta bentuk informasi lain dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nonlaba, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan untuk menilai :

- a. Kemampuan dari entitas nonlaba dalam memberikan jasa secara berkelanjutan
- b. *Likuiditas, fleksibilitas* keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Tujuan utama dari laporan penghasilan komprehensif yakni untuk menunjukkan jumlah *surplus (defisit)* dan juga penghasilan komprehensif lain.

Laporan ini menyediakan informasi terkait :

- a. Pengaruh dari transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah pendapatan
- b. Hubungan antar transaksi, peristiwa lain mengenai jumlah beban
- c. Bagaimana penggunaan sumberdaya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan ini menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset neto (misal, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka akan disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

4. Laporan Arus Kas

Tujuan laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan juga pengeluaran kas dalam satu periode. Informasi arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan sangat berguna dalam menilai kemampuan

organisasi dan menghasilkan kas dan setara kas serta memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan juga membandingkan nilai sekarang arus kas masa depan dari berbagai operasi yang dilakukan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan memaparkan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan laporan keuangan lainnya wajib disajikan. CaLK dapat menyediakan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas berorientasi nonlaba.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun penelitian, serta variabel yang digunakan dan juga hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rusdiyanto 2016	Penerapan PSAK 45 pada Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Sendang.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep Madura belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45

2	Endra Julianto, Nurita Affan, dan Ferry Dayanti 2017	Analisis Penerapan PSAK 45 Yayasan Al-Ma'ruf Samarinda.	Yayasan Al-Ma'ruf Samarinda belum mencatat nilai perolehan aset yang dimilikinya serta belum menilai penyusutan. Sehingga nilai aset tidak dapat dilaporkan dilaporan keuangan. Selain itu, Yayasan tersebut juga belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan keuangan PSAK 45.
3	Ririn Oktaviani 2020	Analisis Penerapan Akuntansi pada Yayasan SD IT Al-Hidayah, Pekanbaru.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD IT Al-Hidayah belum sesuai dengan siklus akuntansi, yayasan juga mencatat aktiva tetap terlalu besar dan tidak melakukan perhitungan biaya penyusutan. Yayasan menyajikan laporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK 45 tentang akuntansi organisasi nirlaba.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang serta telaah pustaka yang telah dikemukakan diatas, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut :

“Penerapan Akuntansi Keuangan pada Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum Kabupaten Rokan Hulu, belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum seperti diatur dalam PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif serta tidak menggunakan data statistik dan sering juga disebut sebagai pendekatan penelitian yang naturalistik. Penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat kondisi alamiah langsung ke sumber data, penelitian kualitatif juga lebih bersifat deskriptif dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti dan mendeskripsikan tentang penerapan akuntansi di Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Objek penelitian ini adalah Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum.

3.3 Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data dari hasil pengamatan yang tidak dapat diukur dan hanya berupa keterangan-

keterangan tertulis, misalnya data laporan keuangan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara penulis kepada pihak yang bersangkutan yaitu objek penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh hasil wawancara dari Pembina, Pengurus dan juga bendahara Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum.

2. Data sekunder

Merupakan data yang didapat secara tidak langsung atau bukan hasil wawancara. Di penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder penulis adalah catatan keuangan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum yang bersumber dari bendahara.

3.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi, adalah suatu proses melihat, mengamati, serta mencermati untuk suatu tujuan tertentu. Jika kita kaitkan dengan sumber data, maka observasi ditujukan untuk mendapatkan data terkait sebuah aktivitas yang telah berlangsung. Metode observasi digunakan untuk melihat secara

langsung aktivitas transaksi keuangan pada Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum.

- b. Wawancara, adalah percakapan antara dua orang dan bertujuan untuk mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengalaman, pemikiran, perilaku, perasaan serta pendapat dari seorang responden. Metode wawancara dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam yayasan yang mengetahui tentang permasalahan yang diangkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penerapan akuntansi yayasan.
- c. Dokumentasi, merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data sekunder sehubungan dengan Penerapan Akuntansi dalam Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum.

3.5 Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dideskripsikan sehingga diperoleh kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada dilapangan. Berikut tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data merupakan tahap merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang penulis reduksi adalah data dari hasil observasi, wawancara dan metode dokumentasi, seperti data hasil observasi terkait pencatatan keuangan berdasarkan akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil-Ulum.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah direduksi, maka tahap berikutnya adalah mendisplaykan data. Pada penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcart*. Hal tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan data supaya memudahkan pemahaman penulis dan juga pembaca dalam menganalisis pencatatan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum pada Pondok Pesantren Al-Miftah Lil-Ulum.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang berkaitan dengan pencatatan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, pada Pondok Pesantren Al-Miftah Lil-Ulum yang telah direduksi dan juga disajikan akan berubah apabila

tidak ditemukan suatu bukti (verifikasi) yang menguatkan dan mendukung. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang *valid* seperti jurnal, dan laporan keuangan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil-Ulum, maka kesimpulan yang ditarik merupakan kesimpulan yang tepat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menunjang kualitas sumberdaya masyarakat. Dengan adanya pendidikan, manusia memiliki ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Pendidikan formal merupakan suatu tempat untuk belajar mengenai aspek umum dalam kehidupan, seperti belajar ilmu pengetahuan alam, pengetahuan sosial dan lain sebagainya. Selain pendidikan formal pendidikan non formal keagamaan juga sangat diperlukan untuk membentuk karakter diri manusia yang lebih baik.

Pentingnya ilmu keagamaan dalam kehidupan menjadi landasan utama didirikannya Pondok Pesantren Al-Miftah Lil Ulum, selain itu di Desa Marga Mulya belum ada lembaga pendidikan keagamaan. Bapak Jamhuri memiliki dua orang anak yang keduanya mempunyai latar belakang pendidikan pesantren, beliau berfikir bahwa, apabila anaknya tersebut selesai menyenjam pendidikan, nantinya bisa membantu dalam mengembangkan pondok pesantren tersebut.

Sumber daya manusia di Desa Marga Mulya banyak yang tidak memiliki pekerjaan setelah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, hal itu juga menjadi salah satu tujuan didirikannya Pondok Pesantren untuk membuka lapangan pekerjaan bagi pihak yang membutuhkan. Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah

Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum resmi berdiri pada tahun 2017 yang di sahkan dengan adanya keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor keputusan AHU-0017592.AH.01.04 yang beralamat di Desa Marga Mulya Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, Riau dengan seorang pendiri yang bernama Bapak Ahmad Jamhuri.

4.1.2 Visi dan Misi Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum

Visi : Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum sebagai pusat pendidikan Islam yang mampu menghasilkan generasi cinta Al-Qur'an.

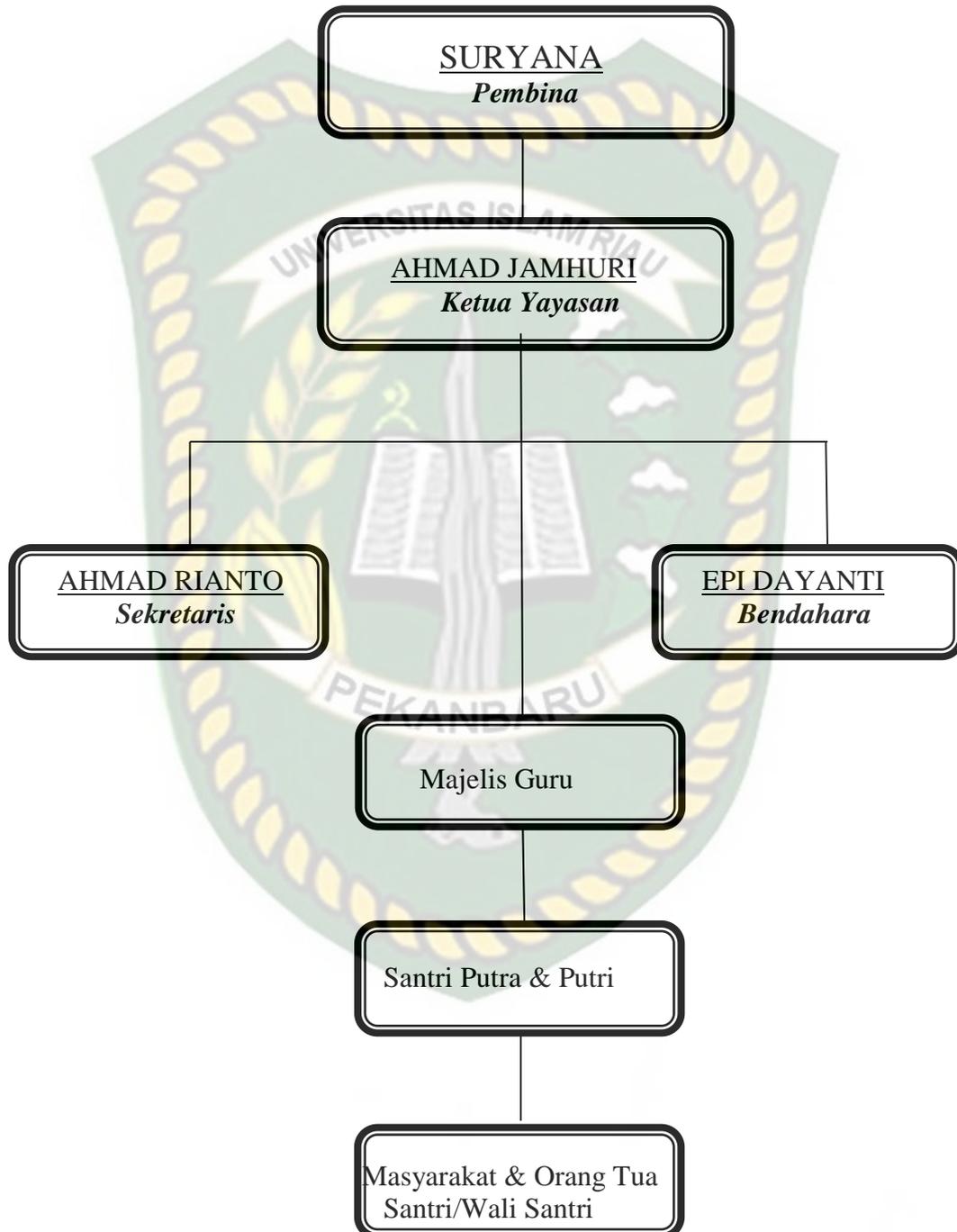
Misi :

1. Menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari
2. Memberikan pelayanan pendidikan sesuai kurikulum pendidikan agama islam, memberikan bimbingan dan pembinaan potensi siswa berdasarkan nilai keislaman dan berfokus pada bimbingan hafalan Qur'an.
3. Menjalin kerjasama dengan orang tua/wali dan pihak yang terkait dalam membimbing siswa.

4.1.3 Struktur Organisasi Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum

Sebuah yayasan memiliki struktur organisasi agar kegiatan yayasan berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan yayasan. Struktur organisasi Pondok Pesantren Al-Miftah Lil Ulum Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pondok Pesantren Al-Miftah Lil Ulum



Sumber : Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum

Berikut merupakan uraian tugas pengurus Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al- Miftah Lil Ulum :

1. Pembina

Tugas serta kebijakan dari Pembina yaitu membuat keputusan mengenai perubahan anggaran dasar pondok pesantren, mengangkat serta memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas pondok pesantren, kemudian berhak memberikan pembagian tugas atas anggota yayasan dan menetapkan kebijakan umum yang diterapkan berdasarkan anggaran dasar pondok pesantren.

2. Ketua

Tugas ketua pondok pesantren yakni bertanggungjawab atas seluruh pengelolaan, memimpin pelaksanaan administrasi pesantren dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja semester dan tahunan
2. Membagi serta menyusun tugas pokok struktural dan fungsional
3. Memimpin dan mengoordinasi semua kegiatan yang berada di lingkungan tanggung jawabnya
4. Merencanakan pengembangan pondok pesantren
5. Mengelola kelembagaan pondok pesantren

3. Bendahara

Bendahara bertugas untuk mengelola keuangan pondok pesantren, tugas serta wewenang dari bendahara adalah sebagai berikut :

1. Membuat tata aturan pengelolaan keuangan pesantren
2. Mengatur keluar masuknya keuangan pesantren
3. Membukukan keuangan secara teratur dengan disertai bukti transaksi
4. Sekretaris

Bertugas mengelola administrasi pondok pesantren, tugas dan wewenang sekretaris adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas surat menyurat
2. Bertanggung jawab atas semua administrasi serta data pesantren
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat pesantren
5. Majelis Guru

Majelis guru bertugas untuk mengajar serta memberikan materi ajar untuk para santri, bertanggung jawab atas ilmu yang disampaikan agar bermanfaat, dapat dimengerti serta mampu diterapkan oleh para santri di kehidupan sehari-hari.

6. Santri Putra dan Putri

Santri merupakan semua anak didik yang ada di pondok pesantren yang memiliki hak untuk mendapatkan ilmu pendidikan agama dari para majelis guru serta mendapatkan bimbingan selama menjadi santri di pondok pesantren.

7. Masyarakat dan Orang tua santri/wali santri

Masyarakat serta orang tua/wali santri yang ada di lingkungan pondok pesantren diharapkan mampu berkontribusi untuk pondok pesantren agar aktivitas pendidikan dapat berjalan dengan baik.

4.1.4 Aktivitas Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum

Aktivitas di Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum bergerak dibidang pendidikan. Pendidikan yang diberikan yakni pendidikan formal seperti TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah). Pelayanan yang diberikan meliputi sarana belajar dan mengajar. TPQ diseleggarakan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul islam pada usia taman kanak-kanak. Sedangkan MDTA merupakan tambahan pendidikan agama islam terutama bagi siswa yang belajar di sekolah dasar (SD), mata pelajaran yang diajarkan setara dengan pondok pesantren pada umumnya, yaitu bidang Al-Quran Hadist, Tajwid, Aqidah Akhlaq, Fiqih, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktik Ibadah, Nahwu Sorof dll.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan akuntansi sangat penting untuk mengetahui perkembangan suatu aktivitas ekonomi organisasi, seperti dijabarkan di bagian telaah pustaka. Selain untuk mengetahui perkembangan ekonomi organisasi, akuntansi menghasilkan suatu informasi akuntansi yang sangat berguna bagi pihak manajemen organisasi dalam hal mengambil keputusan. Bagian ini akan menjelaskan mengenai penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum. Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan di bab 1 pada bagian latar belakang masalah, dan juga berpedoman

pada teoritis yang relevan seperti dipaparkan di bab II pada bagian telaah pustaka, maka dari itu penulis akan menganalisis mengenai pencatatan akuntansi yang diterapkan pada Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum Kabupaten Rokan Hulu, berikut penjelasannya :

4.2.1 Dasar Pencatatan Akuntansi

Dasar pencatatan yang diterapkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum adalah basis kas (*cash basis*) yaitu mencatat transaksi hanya saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh pihak pondok pesantren. Hal ini dapat diketahui saat Pondok Pesantren tidak menyajikan piutang maupun hutang di laporan posisi keuangan (Lampiran 1).

4.2.2 Proses Akuntansi pada Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum

Proses akuntansi yang diterapkan di Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum dimulai dari mencatat semua transaksi harian kedalam buku kas umum harian, pencatatan tersebut berdasarkan bukti transaksi yang ada. Di dalam buku kas umum harian mencatat jumlah pemasukan serta pengeluaran yang terjadi. Pemasukan atau pendapatan yang diperoleh pondok berasal dari uang spp yang dibayarkan siswa, kemudian dari donatur berupa dana untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan, setiap tahunnya pondok pesantren juga mendapatkan bantuan dari BumDes (Badan Usaha Milik Desa) setempat. Sedangkan untuk pengeluaran yang terjadi di pondok pesantren

biasanya meliputi pembayaran insentif guru, pembelian Atk, pembayaran listrik, pembelian barang habis pakai, pembelian perlengkapan kelas, fotocopy dsb.

Buku kas umum harian tersebut digunakan pihak pondok untuk membuat laporan keuangan bulanan, dalam laporan keuangan bulanan menunjukkan jumlah saldo akun pendapatan serta pengeluaran yang terjadi selama bulan tersebut. Dari saldo akun keuangan bulanan Pondok pesantren membuat laporan aktivitas serta laporan posisi keuangan. Selain menyajikan laporan keuangan, pondok pesantren juga membuat daftar aktiva tetap yang dimilikinya.

4.2.3 Analisis Penerapan Akuntansi pada Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan serta membandingkan pencatatan keuangan pondok pesantren dengan pencatatan keuangan yang seharusnya diterapkan pondok pesantren, sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum, berikut penjelasannya :

1. Buku Kas Harian

Aktivitas keuangan dicatat pondok pesantren ke dalam buku kas umum harian, seperti telah dijelaskan pada bagian proses akuntansi pondok pesantren, buku kas umum harian tersebut dicatat berdasarkan bukti transaksi yang telah dikumpulkan. Di dalam buku kas umum harian, mencatat semua pendapatan serta pengeluaran yang terjadi setiap harinya. Pendapatan yang diperoleh pondok pesantren berasal dari pembayaran spp siswa, dana donatur dan juga bantuan dana dari Badan Usaha Milik Desa (BumDes) setempat. Sedangkan pengeluaran

yang terjadi di pondok pesantren yakni, untuk pembayaran insentif guru, listrik, fotocopy, pembelian Atk dll. Berikut adalah buku kas umum harian yang disajikan pondok pesantren terlihat seperti tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Buku Kas Harian
Bulan Januari 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01/01/2019	Saldo Desember 2018			20,240,000
01/01/2019	Pendapatan Spp	670,000		20,910,000
02/01/2019	Pendapatan Spp	340,000		21,250,000
02/01/2019	Beli Perlengkapan Kamar Mandi		77,000	21,173,000
03/01/2019	Dana Donatur	1,500,000		22,673,000
04/01/2019	Bayar Listrik		1,318,000	21,355,000
05/01/2019	Pendapatan spp	100,000		21,455,000
06/01/2019	Konsumsi		69,000	21,386,000
06/01/2019	Fotocopy		56,000	21,330,000
07/01/2019	Pendapatan spp	600,000		21,930,000
08/01/2019	Pendapatan Spp	210,000		22,140,000
09/01/2019	Pendapatan Spp	160,000		22,300,000
10/01/2019	Pendapatan Spp	340,000		22,640,000
12/01/2019	Pendapatan Spp	150,000		22,790,000
13/01/2019	Beli ATK		258,000	22,532,000
14/01/2019	Pendapatan Spp	320,000		22,852,000
15/01/2019	Pendapatan Spp	250,000		23,102,000
16/01/2019	Pendapatan Spp	175,000		23,277,000
17/01/2019	Pendapatan Spp	450,000		23,727,000
19/01/2019	Pendapatan Spp	135,000		23,862,000
20/01/2019	Pendapatan spp	340,000		24,202,000
21/01/2019	Pendapatan Spp	135,000		24,337,000
22/01/2019	Pendapatan Spp	230,000		24,567,000
23/01/2019	Pendapatan Spp	140,000		24,707,000
24/01/2019	Pendapatan Spp	250,000		24,957,000
25/01/2019	Pendapatan Spp	180,000		25,137,000
27/01/2019	Pendapatan Spp	260,000		25,397,000

30/01/2019	Pembayaran Insentif Guru		4,000,000	21,397,000
------------	--------------------------	--	-----------	------------

Sumber : Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pondok pesantren menggabungkan pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran kas tanpa membuat jurnal untuk setiap transaksi yang terjadi. Sehingga tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, seharusnya pondok pesantren membuat jurnal khusus untuk memisahkan penerimaan serta pengeluaran kas, sehingga pondok pesantren dapat mengetahui secara rinci semua pengeluaran dan total pengeluaran serta dapat melihat seluruh pendapatan yang diterima pada bulan tersebut, dapat kita lihat bentuk jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jurnal Penerimaan Kas
Bulan Januari 2019

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	
			Kas	Spp	Hibah
01/01/19	Pendapatan spp		670,000	670,000	
02/01/19	Pendapatan spp		340,000	340,000	
03/01/19	Pendapatan dari donatur		1,500,000		1,500,000
05/01/19	Pendapatan spp		100,000	100,000	
07/01/19	Pendapatan spp		600,000	600,000	
08/01/19	Pendapatan spp		210,000	210,000	
09/01/19	Pendapatan spp		160,000	160,000	
10/01/19	Pendapatan spp		340,000	340,000	
12/01/19	Pendapatan spp		150,000	150,000	
14/01/19	Pendapatan spp		320,000	320,000	
15/01/19	Pendapatan spp		250,000	250,000	
16/01/19	Pendapatan spp		175,000	175,000	
17/01/19	Pendapatan spp		450,000	450,000	
19/01/19	Pendapatan spp		135,000	135,000	

20/01/19	Pendapatan spp		340,000	340,000	
21/01/19	Pendapatan spp		135,000	135,000	
22/01/19	Pendapatan spp		230,000	230,000	
23/01/19	Pendapatan spp		140,000	140,000	
24/01/19	Pendapatan spp		250,000	250,000	
25/01/19	Pendapatan spp		180,000	180,000	
27/01/19	Pendapatan spp		260,000	260,000	
Jumlah			6,935,000	5,435,000	1,500,000

Sumber : Data Olahan

Tabel 4.3
Jurnal Pengeluaran Kas
Bulan Januari 2019

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit				Kredit
			Beban Gaji	Biaya Listrik	Lain-Lain	Jumlah	Kas
02/01/19	Beli perlengkapan kamar mandi				Perlengkapan kamar mandi	77,000	77,000
04/01/19	Bayar listrik			1,318,000			1,318,000
06/01/19	Beli makanan				konsumsi	69,000	69,000
06/01/19	Fotocopy				Fotocopy	56,000	56,000
13/01/19	Beli Alat Tulis Kantor				perlengkapan ATK	258,000	258,000
30/01/19	Pembayaran insentif guru		4,000,000				4,000,000
Jumlah			4,000,000	1,318,000		460,000	5,778,000

Sumber : Data Olahan

2. Buku Besar

Pondok Pesantren Al-Miftah Lil-Ulum setelah mencatat semua transaksi ke buku kas umum harian, kemudian membuat laporan keuangan bulanan, yang didalamnya terdapat komponen pendapatan serta pengeluaran setiap bulannya. Pondok pesantren Al-Miftah Lil Ulum tidak membuat buku besar, buku besar sangat berguna untuk melihat saldo akhir dari setiap akun dan berfungsi untuk

membuat neraca saldo. Setelah pencatatan jurnal penerimaan serta pengeluaran kas, Pondok Pesantren dapat menyajikan buku besar seperti digambarkan pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Buku Besar
Bulan Januari 2019

Akun : Kas						
Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
31/01/19	Jurnal Penerimaan Kas		6,935,000		6,935,000	
31/01/19	Jurnal Pengeluaran Kas			5,778,000	1,157,000	

Akun : Pendapatan spp						
Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
31/01/19	Jurnal Penerimaan Kas			5,435,000		5,435,000

Akun : Pendapatan Hibah						
Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
31/01/19	Jurnal Penerimaan Kas			1,500,000		1,500,000

Akun : Perlengkapan kamar mandi						
Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
31/01/19	Jurnal Pengeluaran Kas			77,000		77,000

Akun : Biaya listrik						
Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
31/01/19	Jurnal Pengeluaran Kas			1.318,000		1.318.000

Akun : Konsumsi						
Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
31/01/19	Jurnal Pengeluaran Kas			69,000		69,000

Akun : Perlengkapan ATK dan Fotocopy						
Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
31/01/19	Jurnal Pengeluaran Kas			314,000		314,000

Akun : Beban gaji						
Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
31/01/19	Jurnal Pengeluaran Kas			4,000,000		4,000,000

Sumber : Data Olahan

3. Neraca Saldo

Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum tidak membuat neraca saldo. Penyajian neraca saldo bermanfaat untuk melihat keseimbangan akun yang telah di sajikan di buku besar, selain itu saldo akun yang ada di neraca saldo berguna untuk disajikan di dalam laporan keuangan. Untuk melihat nilai saldo akun, dapat dilihat dari total saldo akhir yang ada di buku besar. Neraca Saldo dapat disajikan pondok pesantren seperti terlihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Neraca Saldo
Tahun 2019

Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
	Kas	8,819,000	
	Pendapatan spp		69,885,000
	Pendapatan hibah		9,500,000
	Pendapatan BumDes		400,000
	Perlengkapan kamar mandi	699,000	
	Perlengkapan ATK	2,235,000	
	Perlengkapan Kelas	149,000	
	Peralatan kelas	395,000	
	Biaya listrik	15,224,000	
	Biaya tunjangan hari raya	1,000,000	
	Biaya soal ujian	619,000	
	Biaya lain-lain	1,200,000	
	Beban gaji	48,000,000	
	Konsumsi	1,445,000	
	Total	79,785,000	79,785,000

Sumber : Data Olahan

4. Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian merupakan proses untuk menyesuaikan catatan entitas dengan fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum tidak membuat jurnal penyesuaian, sehingga penyajian akun yang ada di laporan keuangan tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Maka dari itu, perlu dibuat jurnal penyesuaian agar laporan keuangan yang dihasilkan menunjukkan nilai yang sesungguhnya dan informasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Seharusnya pondok pesantren membuat jurnal penyesuaian supaya nilai dari akun-akun menunjukkan nilai yang sebenarnya pada tanggal perolehan. Dengan menggunakan metode garis lurus, pondok pesantren dapat menghitung nilai penyusutan :

a. Bahan habis pakai

Bahan habis pakai merupakan pembelian seperti kertas, pena, tinta, printer, alat tulis kantor dan sebagainya. Pondok pesantren sudah menyajikan nilai yang sesungguhnya untuk bahan habis pakai di laporan posisi keuangan, karena nilai yang disajikan adalah nilai sisa dari bahan habis pakai, namun pondok pesantren tidak mencatat jurnal penyesuaiannya. Pondok pesantren dapat membuat jurnal penyesuaian atas bahan habis pakai seperti berikut:

Selama tahun 2019, pondok pesantren membeli bahan habis pakai sebagai berikut:

Pembelian bahan habis pakai sebesar Rp. 56.000

Pembelian ATK sebesar Rp. 2.235.000 +

Total bahan habis pakai Rp. 2.291.000

Pada tanggal 31 Desember 2019 di laporan posisi keuangan pondok pesantren tertera bahwa sisa bahan habis pakai sebesar Rp. 291.000. untuk jumlah bahan habis pakai yang telah digunakan adalah sebagai berikut :

$Rp. 2.291.000 - Rp. 291.000 = Rp 2.000.000$

Dari data tersebut, maka pada tanggal 31 Desember 2019 jurnal penyesuaian atas bahan habis pakai adalah sebagai berikut :

Biaya Habis Pakai Rp. 291.000

Bahan Habis Pakai Rp. 291.000

b. Aset tetap

Aset tetap pondok pesantren terdiri atas tanah, bangunan serta peralatan. Namun, untuk aset tetap seperti tanah tidak mengalami penurunan nilai, maka tidak perlu dilakukan penghitungan penyusutan atas tanah. Aset tetap yang perlu dihitung nilai penyusutannya yakni bangunan serta peralatan. Nilai bangunan yang disajikan pondok pesantren belum menunjukkan nilai yang sesungguhnya karena belum ada pengurangan nilai penyusutan atas bangunan. Pada tahun 2017

harga perolehan untuk bangunan sebesar Rp. 236.450.000.- jika ditaksir umur dari bangunan tersebut 20 tahun maka :

Penyusutan Tahunan : Rp. 236.450.000 : 20 tahun = Rp. 11.822.500

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jurnal penyesuaian yang seharusnya dicatat pondok pesantren pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Beban Penyusutan Bangunan Rp. 11.822.500

Akumulasi Penyusutan Bangunan Rp. 11.822.500

Tidak hanya bangunan, peralatan juga perlu disesuaikan agar nilai yang disajikan sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Pondok pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Mifah Lil Ulum belum membuat jurnal penyesuaian atas peralatan, sehingga nilai peralatan yang disajikan belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Peralatan yang disajikan pondok pesantren di tahun 2019 senilai Rp. 37.071.000.- jika ditaksir umur ekonomis peralatan tersebut 4 tahun maka :

Penyusutan Tahunan : Rp. 37.071.000 : 4 tahun = Rp. 9.267.750

Berdasarkan perhitungan diatas, Pada 31 Desember 2019 jurnal penyesuaian yang seharusnya dicatat pondok pesantren adalah sebagai berikut :

Beban Penyusutan Peralatan Rp. 9.267.750

Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp. 9.267.750

5. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disajikan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum adalah laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas. Berikut adalah analisis mengenai laporan keuangan yang disajikan pondok pesantren dapat dilihat sebagai berikut :

a. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas disajikan pondok pesantren dengan komponen yang terdiri dari pendapatan serta biaya operasional, laporan aktivitas yang disajikan pondok pesantren Al-Miftah Lil Ulum adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Laporan Aktivitas Yayasan

Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum	
Laporan Aktivitas Tahunan	
Periode 2019	
Pendapatan	
Pendapatan SPP	69.885.000
Dana Donatur	9.500.000
Bantuan dari BUMDes	400.000
<i>Total Pendapatan</i>	Rp. 79.785.000
Biaya Operasional	
Beban Gaji	48.000.000
Perlengkapan ATK	244.000
Biaya Adm Lomba	158.000
Beli ATK	2.235.000
Beli Perlengkapan Kamar Mandi	699.000

Fotocopy	592.000
Beli Materai	150.000
Beli Peralatan Kelas	200.000
Beli barang habis pakai	56.000
Cetak soal ujian	619.000
Bayar Listrik	15.224.000
Beli Kipas	195.000
Konsumsi	1.445.000
Tunjangan Hari Raya Guru	1.000.000
Beli Pel, Sapu, dll	149.000
<i>Total Biaya Operasional</i>	Rp.70.966.000
Saldo Akhir	<u>Rp. 8.840.000</u>

Sumber : Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum

Berdasarkan laporan yang disajikan oleh pondok pesantren, laporan aktivitas belum sesuai dengan PSAK No. 45 karena penyajian laporan aktivitas masih seperti unsur laporan laba rugi. Laporan aktivitas pondok pesantren tidak menyajikan kenaikan aset neto, aset neto pada awal tahun dan juga aset neto pada akhir tahun. Selain itu untuk akun pendapatan spp disajikan senilai Rp.69.885.000,- nilai yang sesungguhnya adalah Rp.69.750.000 perbedaan nilai tersebut karena ada kesalahan pencatatan di buku kas umum harian pada tanggal 17 september 2019 untuk pendapatan spp. Maka laporan aktivitas yang dibuat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Laporan Aktivitas

Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum	
Laporan Aktivitas Tahunan	
Periode 2019	
Pendapatan	
Pendapatan SPP	69.750.000
Pendapatan Hibah	9.500.000
Pendapatan dari BumDes	400.000
<i>Total Pendapatan</i>	Rp. 79.650.000
Biaya Operasional	
Perlengkapan Kamar Mandi	699.000
Perlengkapan ATK	2.235.000
Perlengkapan Kelas	149.000
Peralatan Kelas	395.000
Biaya Listrik	15.224.000
Biaya Tunjangan Hari Raya	1.000.000
Biaya Soal Ujian	619.000
Biaya Lain-Lain	1.200.000
Beban Gaji	48.000.000
Konsumsi	1.445.000
<i>Total Biaya Operasional</i>	Rp. 70.966.000
Kenaikan aset neto	Rp. 8.684.000
Aset neto pada awal tahun	Rp. 20.240.000
Aset neto pada akhir tahun	Rp. 28.924.000

Sumber : Data Olahan

b. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan yang disajikan pondok pesantren adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Laporan Posisi Keuangan Yayasan

Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum	
Laporan Posisi Keuangan	
Periode 2019	
Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp. 28.924.000
Persediaan ATK	Rp. 291.000
Aset Tetap	
Tanah	Rp. 214.000.000
Bangunan	Rp. 236.450.000
Peralatan	Rp. 37.071.000
	Rp. 516.736.000
<i>Jumlah Aset</i>	
Utang	
Utang jangka pendek	-
Utang lain-lain	-
Total Utang	-
Aset Neto	
Tidak terikat	Rp. 364.569.000
Terikat sementara	<u>Rp. 152.167.000</u>
	Rp. 516.736.000
<i>Jumlah Aset Neto</i>	

Sumber : Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penyajian laporan keuangan telah memisahkan antara aset lancar dan aset tetap.

a. Kas

Laporan posisi keuangan (neraca) pada Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum pada tahun 2019 terdapat akun kas sebesar Rp. 28.924.000,- uang kas tersebut adalah uang tunai yang ada di pondok pesantren pada akhir periode. Dari keterangan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa penyajian kas sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

b. Persediaan ATK

Persediaan ATK yang disajikan pondok pesantren dalam laporan posisi keuangan sebesar Rp. 291.000,- persediaan ini merupakan sisa dari persediaan ATK dan bahan habis pakai yang telah digunakan. Seharusnya pondok pesantren tidak mencatat persediaan ATK melainkan mencatatnya sebagai perlengkapan, karena pondok pesantren bukan organisasi yang menjual alat tulis kantor, jadi tidak seharusnya mengakui sebagai persediaan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian persediaan ATK tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

c. Aset Tetap

Aset tetap yang disajikan pada laporan posisi keuangan masih senilai harga perolehannya, belum melakukan pengurangan atas penyusutan sehingga nilai aset tetap belum menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Nilai aset tetap yang

disajikan pada tahun 2019 yaitu terdiri dari bangunan sebesar Rp. 236.450.000,- dan peralatan Rp. 37.071.000,- yang belum disusutkan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian aset tetap pada laporan keuangan belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

d. Hutang

Hutang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan pondok pesantren, karena, pondok pesantren menerapkan pencatatan berbasis kas, pencatatan berbasis kas hanya akan mencatat penerimaan serta pengeluaran saat kas atau setara kas itu diterima maupun dikeluarkan. Maka dari itu tidak ada akun hutang maupun piutang yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan pondok pesantren.

Laporan posisi keuangan yang seharusnya disajikan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Laporan Posisi Keuangan

Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum	
Laporan Posisi Keuangan	
Periode 2019	
Aset	
Aset Lancar	
Kas	Rp. 28.924.000
Perlengkapan	<u>Rp. 291.000</u>
Total Aset Lancar	Rp. 29.215.000
Aset Tetap	
Tanah	Rp. 214.000.000
Bangunan	Rp. 236.450.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(Rp. 35.467.500)
Peralatan	Rp. 37.071.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan	<u>(Rp. 9.267.750)</u>
Total Aset Tetap	Rp. 442.785.750
<i>Jumlah Aset</i>	Rp. 472.000.750
Utang	
Utang jangka pendek	-
Utang lain-lain	-
Total Utang	-
Aset Neto	
Tidak terikat	Rp. 319.833.750
Terikat sementara	<u>Rp. 152.167.000</u>
<i>Jumlah Utang dan Aset Neto</i>	Rn. 472.000.750

Sumber : Data Olahan

Setelah dilakukan koreksi atas laporan posisi keuangan pondok pesantren, saldo akhir laporan posisi keuangan tersebut adalah sebesar Rp. 472.000.750,-

perubahan ini terjadi karena adanya koreksi terhadap penambahan perkiraan akumulasi penyusutan atas bangunan dan peralatan. Bangunan di peroleh pada tahun 2017, sehingga pada tanggal 31 Desember 2019 telah digunakan selama 3 tahun, nilai akumulasi penyusutan atas bangunan nya adalah:

Akumulasi penyusutan = (penyusutan pertahun x masa manfaat)

Rp. 11.822.500 x 3 tahun

Rp. 35.467.500.-

Peralatan diasumsikan diperoleh pada tahun 2019, maka untuk akumulasi penyusutannya hanya terhitung 1 tahun yaitu sebesar Rp. 9.267.750.- karena jumlah perkiraan nilai akumulasi penyusutan atas bangunan dan peralaan tersebutlah yang memengaruhi perubahan saldo pada laporan posisi keuangan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum.

c. Laporan Arus Kas

Pondok pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum belum menyajikan laporan arus kas. Arus kas merupakan rincian yang menunjukkan jumlah pemasukan serta pengeluaran dalam suatu periode akuntansi. Laporan arus kas berfungsi untuk melihat kemampuan suatu organisasi dalam mendapatkan kas serta melihat kemampuan suatu organisasi dalam membayar kewajibannya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, seharusnya pondok pesantren menyajikan laporan arus kas untuk melihat kondisi keuangan mengenai arus pendapatan serta pengeluarannya seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Laporan Arus Kas

Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum	
Laporan Arus Kas	
Periode 2018	
Aliran kas dari aktivitas operasi	
Penerimaan kas dari spp	Rp. 69.750.000
Penerimaan kas dari donatur	Rp. 9.500.000
Penerimaan kas dari BUMDes	Rp. 400.000
Pembayaran insentif guru	(Rp. 48.000.000)
Pembayaran listrik	(Rp. 15.224.000)
Pembelian ATK	(Rp. 2.235.000)
Pembelian perlengkapan kelas	(Rp. 149.000)
Pembelian Peralatan Kelas	(Rp. 395.000)
Pembelian perlengkapan kamar mandi	(Rp. 699.000)
Pembelian barang habis pakai, Adm Lomba, fotocopy, cetak undangan, Materai	(Rp. 1.200.000)
Pembayaran cetak soal ujian	(Rp. 619.000)
Pembayaran Tunjangan hari raya	(Rp. 1.000.000)
Pembayaran konsumsi	<u>(Rp. 1.445.000)</u>
Kas neto yang diterima atau digunakan untuk aktivitas operasi	Rp. 9.684.000
Aliran kas dari aktivitas investasi	
Pembelian peralatan listrik	-
Kas neto yang diterima atau digunakan dalam untuk aktivitas investasi	-
Kenaikan (penurunan) neto dalam kas dan setara kas	Rp. 8.684.000
Kas dan setara kas pada awal tahun	Rp. 20.240.000
Kas dan setara kas pada akhir tahun	Rp. 28.924.000

Sumber : Data Olahan

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah salah satu bagian dari suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi terkait kebijakan akuntansi yang diterapkan di suatu organisasi atau entitas. Menurut PSAK 45 Catatan atas laporan keuangan juga sangat berfungsi untuk memberikan informasi tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Di Yayasan Pondok Pesantren Al-Miftah Lil Ulum belum menyajikan catatan atas laporan keuangan, sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui kebijakan akuntansi yang diterapkan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, laporan keuangan pondok pesantren sangat berguna bagi pihak manajemen, masyarakat, donatur serta pemerintah.
2. Laporan organisasi nirlaba diatur dalam PSAK No.45, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa laporan yang harus disajikan oleh organisasi yang tidak berorientasi laba meliputi : laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.
3. Pencatatan keuangan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum menggunakan pendekatan berbasis kas (*cash basis*), yaitu pondok pesantren hanya akan mencatat transaksi saat adanya kas masuk atau kas keluar.
4. Proses akuntansi pondok pesantren dimulai dari pencatatan transaksi kedalam buku kas umum harian, kemudian merekap kedalam laporan kas bulanan. Dari saldo akhir kas bulanan tersebut pondok pesantren

menyajikan laporan keuangan yang meliputi : laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas.

5. Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum belum membuat jurnal, buku besar, neraca saldo, sehingga belum sesuai dengan siklus akuntansi yang berlaku umum.
6. Pondok pesantren menyajikan aset tetap kedalam daftar aset tetap, namun belum menghitung penyusutan atas aset sehingga, nilai di laporan posisi keuangan disajikan terlalu tinggi.
7. Laporan arus kas serta Catatan atas Laporan Keuangan belum disajikan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum.
8. Penerapan akuntansi pada Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum.

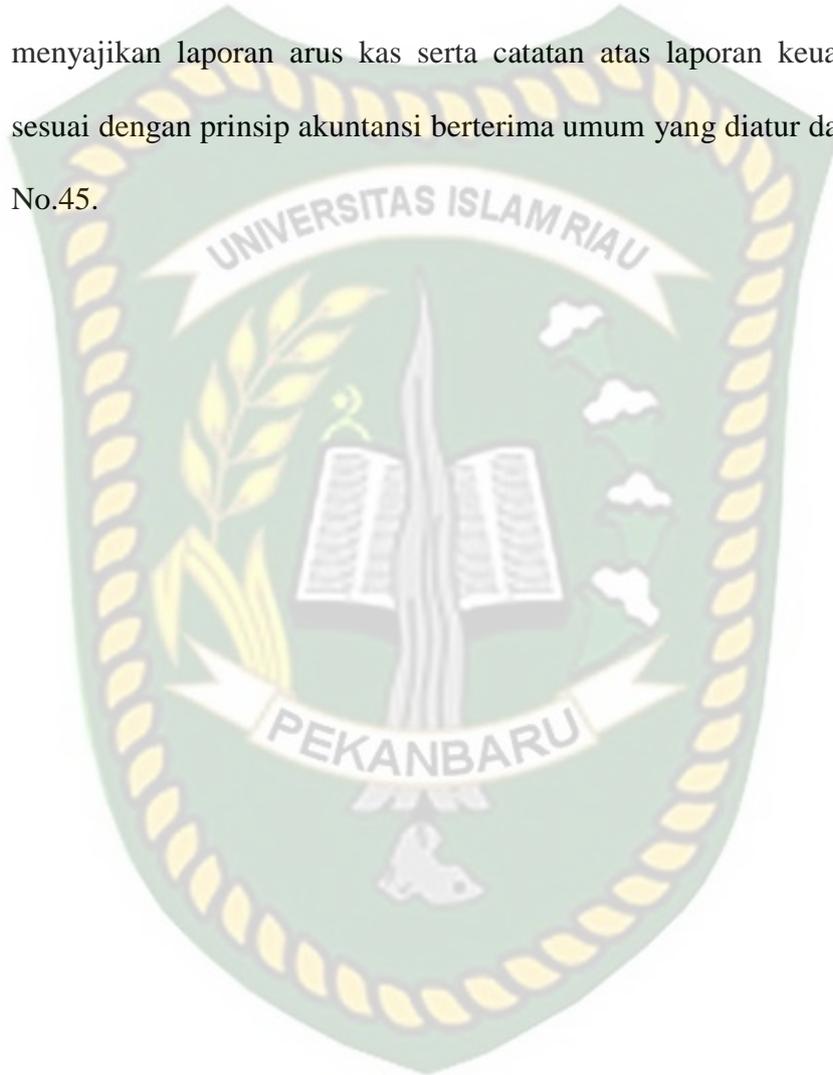
5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum seharusnya membuat jurnal untuk setiap transaksi yang terjadi, kemudian membuat buku besar yang berfungsi untuk mengumpulkan data atau transaksi yang telah dicatat dalam satu periode dan harus dilakukan secara berkelanjutan.
2. Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum seharusnya menghitung penyusutan atas aset tetap, sehingga penyajian aset tetap sesuai dengan nilai yang sebenarnya, selain itu juga dapat berfungsi untuk

melihat bahwa ada penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki oleh pondok pesantren.

3. Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Al-Miftah Lil Ulum seharusnya menyajikan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang diatur dalam PSAK No.45.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Hasiholan, Pulungan ; Ahmad Basid Hasibuan, dan Luciana Haryono. (2013). *Akuntansi Keuangan Dasar Berbasis PSAK Per 1 Juni 2012*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Aswaratika, Listya dan Dian Purnama Anugerah. (2018). *Kedudukan Yayasan yang Belum Disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir*. Jurnal Notaire Vol. 01 No. 01 Juni 2018.
- Ernawati, Sri;Jumirin Asyikin, dan Octavia Sari. (2016). *Penerapan Sistem Akuntansi Dasar pada Usaha Kecil Menengah di Kota Banjarmasin*. Jurnal Peneliti Ilmu Ekonomi Vol. 6 No. 2 September 2016.
- Hurriyaturohman. (2018). *Analisis Penerapan PSAK No.45 pada Yayasan Masjid Al Falah Bogor*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 13 No.1 2018.
- Julianto, Endra; Nurita Affan, dan Ferry Dayanti. (2017). *Analisis Penerapan PSAK No.45*. Jurnal Manajemen Vol. 9 No. 2 2017.
- Kieso, Donald E; Weygandt, Jerry J; dan Warfield, Terry D.(2017). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta:Salemba Empat.
- Rahayu,Yuri.(2015). *Reformasi Sistem Akuntansi Cash Basis Menuju Sistem Akuntansi Accrual Basis*. Jurnal Ecodemica Vol III No.1 April 2015.
- Rasyid, Fatmawaty Gino.(2016). *Analisis Penerapan Akuntansi atas Aset Tetap pada PT. Sederhana Karya Jaya Manado*. Jurnal EMBA Vol 4 No. 1 Maret 2016.
- Ririn Oktaviani.,(2020). *Analisis Penerapan Akuntansi pada Yayasan SD IT Al-Hidayah di Kota Pekanbaru*. Skripsi.Pekanbaru.
- Rusdiyanto. (2016). *Penerapan PSAK No.45 pada Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Sendang Pragaan Sumenep Madura Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan*. Jurnal Fakultas Ekonomi Vol. 05 No.01 Juli 2016.
- Salsabila Nurul Azmi.,(2019). *Analisis Implementasi Pencatatan Keuangan Berbasis Pedoman Akuntansi Pesantren (Studi Kasus pada Pondok Pesantren.Al-Urwatul Utsqo Indramayu)*. Skripsi. Surabaya.
- Simamora, Y.Sogar. (2012). *Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia*. Jurna l Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 01 No.02 Agustus 2012.

Somali, Soni Gunawan. (2018). *Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang. No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*. Jurnal Sosiohumanitas Vol XX Edisi 1. Band

ung.

Warren, Carl S; James M. Reeve; Jonathan E. Duchac; Ersa Tri Wahyuni, dan Amir Abadi Jusuf.(2017). *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta:Salemba Empat.

Yanuarisa, Yesika. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya*. Jurnal Balance Vol.12 No. 2 Juli 2020.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45*, Jakarta.

